



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur kembali kode klasifikasi arsip dalam penyelenggaraan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Kode Klasifikasi Arsip;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta Arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok pencipta Arsip yang membedakan antarpencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (4) Klasifikasi Arsip menggunakan kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (5) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip.
- (6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kode klasifikasi arsip dalam Pasal 8 dan Lampiran Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 31/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 20 November 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 20 November 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 44/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP

KODE KLASIFIKASI ARSIP

NO	URAIAN
1	2
000	Umum
000.1	Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan
000.1.1	Telekomunikasi
000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri
000.1.2.1	Perjalanan Dinas Wali Kota
000.1.2.2	Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri
000.1.3.1	Perjalanan Dinas Wali Kota
000.1.3.2	Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas, dan Fasilitas Kantor Lainnya)
000.1.5	Rapat Pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat
000.1.6	Penyediaan Konsumsi
000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas
000.1.7.1	Pengurusan Surat-Surat Kendaraan Dinas
000.1.7.2	Pemeliharaan dan Perbaikan
000.1.7.3	Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan
000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman, dan Peralatan Kantor
000.1.8.1	Pertamanan/ <i>Landscape</i>
000.1.8.2	Penghijauan
000.1.8.3	Perbaikan Gedung
000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor
000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/Wisma
000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman
000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon, dan Komputer
000.1.9.1	Perbaikan/Pemeliharaan
000.1.9.2	Pemasangan
000.1.10	Ketertiban dan Keamanan
000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan Terhadap Pejabat, Kantor, dan Rumah Dinas
000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan
000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir
000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya
000.2	Perlengkapan
000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan
000.2.1.1	Data Hasil Inventarisasi dan Penyimpanan
000.2.2.2	Laporan dan Evaluasi Pemeliharaan Kantor
000.2.3	Distribusi

1	2
000.2.3.1	Barang Habis Pakai
000.2.3.2	Barang Milik Daerah
000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang Dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Termasuk Didalamnya Proses Lelang Penghapusan
000.2.5	Pengelolaan <i>Database</i> Barang Milik Daerah
000.3	Pengadaan
000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa, Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan, Penetapan Kebijakan Umum, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)
000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, dan Pelaksanaan Kontrak)
000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, dan Pelaksanaan Kontrak)
000.3.4	Swakelola (antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi)
000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain: <i>Database</i> Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, <i>Database</i> Kontrak, dan <i>Database</i> Pengadaan Barang/Jasa
000.3.6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan serta Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan Hasil Evaluasi
000.4	Perpustakaan
000.4.1	Kebijakan di Bidang Perpustakaan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Madiun
000.4.2	Deposit Bahan Pustaka
000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional
000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog
000.4.3	Koleksi Pustaka
000.4.3.1	Pembelian
000.4.3.2	Hibah
000.4.3.3	Hadiah
000.4.3.4	Tukar Menukar
000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang Karya Cetak dan Karya Rekam
000.4.3.6	Terbitan Internal
000.4.3.7	Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus
000.4.3.8	Inventarisasi Koleksi (Buku Induk)
000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka
000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi
000.4.6	Layanan Perpustakaan
000.4.6.1	Keanggotaan
000.4.6.2	Peminjaman

1	2
000.4.6.3	Pengembangan Gemar Baca
000.4.7	Kerja Sama Perpustakaan
000.4.7.1	<i>Memorandum Of Understanding</i>
000.4.7.2	Perjanjian Kerja Sama
000.4.7.3	Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerja Sama Internasional
000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
000.4.8.1	Pengembangan Situs <i>Website</i>
000.4.8.2	Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia
000.4.8.3	Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan
000.4.8.4	Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital
000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
000.4.10	Konservasi
000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan
000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan
000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan
000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
000.4.12	Transformasi Digital
000.4.13	Kurasi Digital
000.4.14	Pengembangan Perpustakaan
000.4.14.1	Perpustakaan Umum
000.4.14.2	Perpustakaan Khusus
000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah
000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi
000.5	Kearsipan
000.5.1	Kebijakan di Bidang Kearsipan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
000.5.2	Pembinaan Kearsipan
000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
000.5.2.3	Penilaian Arsiparis
000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
000.5.2.5	<i>Database</i> Arsiparis
000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi antara lain Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
000.5.2.8	<i>Database</i> Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan antara lain Fasilitasi Sumber Daya Manusia Kearsipan, Fasilitasi Prasarana, dan Sarana Kearsipan
000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip antara lain: Berkas Usulan Persetujuan Jadwal Retensi Arsip, Surat Persetujuan Jadwal Retensi Arsip dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis
000.5.3.1	Penciptaan (antara lain Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)

1	2
000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)
000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain Daftar Arsip Inaktif dan Daftar Arsip Inaktif Tematik)
000.5.3.4	Penggunaan (antara lain Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Peminjaman Arsip)
000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis)
000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)
000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, dan Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)
000.5.6	Penyusutan Arsip
000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan dan Daftar Arsip yang Dipindahkan)
000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: Surat Keputusan Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi Sekurang-Kurangnya 10 (Sepuluh) Tahun atau Persetujuan Wali Kota Selaku Pemimpin Pencipta Arsip Untuk Untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, Penetapan Arsip yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, dan Daftar Arsip yang Dimusnahkan)
000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis antara lain: Pembentukan Panitia Penilai, Notulen Rapat Panitia, Surat Pertimbangan Panitia Penilai, Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat Pernyataan Autentik, Terpercaya, Utuh, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, dan Daftar Arsip yang Diserahkan
000.5.7	Alih Media Arsip antara lain: Kebijakan Alih Media, Autentikasi, Berita Acara, dan Daftar Arsip yang Alih Mediakan
000.5.8	Database Pengelolaan Arsip Dinamis
000.5.8.1	Database Pengelolaan Arsip Aktif
000.5.8.2	Database Pengelolaan Arsip Inkatif
000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis
000.5.9.1	Akuisisi antara lain Monitoring Fisik dan Daftar, Verifikasi Terhadap Daftar Arsip, Menetapkan Status Arsip Statis, Persetujuan Untuk Penyerahan, Penetapan Arsip yang Diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang Diserahkan
000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan
000.5.9.3	Sejarah Lisan antara lain Administrasi Kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/Cd/Media Lain Sesuai Perkembangan Teknologi Informasi, dan <i>Transkip</i>)

1	2
000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis antara lain Pengumuman, dan Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis
000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik antara lain:Daftar Arsip Statis, Inventaris Arsip Statis, dan <i>Guide</i>
000.5.9.6	Preservasi Preventif antara lain Penyimpanan, Pengendalian Hama Terpadu, Reproduksi (Alih Media)
000.5.9.7	Preservasi Kuratif
000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis antara lain Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentitas Arsip Statis)
000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain Layanan Arsip, Penerbitan Naskah Sumber)
000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain Konsultasi Kearsipan, Manual Kearsipan, Penataan Arsip, Otomasi Kearsipan, Penyimpanan Arsip, serta Perawatan dan Pemeliharaan Arsip)
000.5.11	Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
000.5.12	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana
000.5.13	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Digabung dan/atau Dibubarkan
000.5.14	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
000.5.15	Pengawasan Kearsipan
000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal
000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal
000.5.15.3	Sanksi
000.6	Persandian
000.6.1	Kebijakan di Bidang Persandian yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
000.6.2	Pengamanan Persandian
000.6.2.1	Pengamanan Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto
000.6.2.2	Analisis Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto
000.6.2.3	Materiil Sandi: Sistem dan Peralatan
000.6.3	Pengkajian Persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian
000.6.4.1	Sumber Daya Manusia
000.6.4.2	Jaringan Komunikasi
000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik
000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi
000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi
000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan <i>Testing</i>
000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikasi Elektronik
000.6.5.7	Pelaporan
000.7	Perencanaan Pembangunan
000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
000.7.1.1	Musrenbang Provinsi
000.7.1.2	Musrenbang Nasional
000.7.1.3	Musrenbang Kabupaten/Kota
000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan
000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan

1	2
000.7.2	Perencanaan Pembangunan Kota Madiun
000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah
000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
000.7.2.6	Rencana Program Kerja Tahunan
000.7.2.7	Program/Kontrak Kerja
000.7.2.8	Laporan Berkala
000.7.2.9	Laporan Insidental
000.7.2.10	Evaluasi Program
000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan
000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
000.7.6	Aksi Strategis Daerah
000.7.6.1	Rencana Awal Perencanaan Aksi Strategi Daerah
000.7.6.2	Rapat Pembahasan Rencana Awal dengan Perangkat Daerah
000.7.6.3	Sosialisasi dengan Perangkat Daerah
000.7.6.4	Rancangan Akhir Perencanaan Aksi Strategi Daerah
000.7.6.5	Penerapan Perencanaan Aksi Strategi Daerah
000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan
000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
000.7.7.2	Pendanaan Daerah
000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional
000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara
000.7.7.5	Pendanaan <i>On Top</i> atau Inisiatif Baru
000.8	Organisasi dan Tata Laksana
000.8.1	Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
000.8.1.1	Pembentukan
000.8.1.2	Pengubahan
000.8.1.3	Pembubaran
000.8.2	Uraian Jabatan
000.8.2.1	Analisa Jabatan
000.8.2.2	Analisa Beban Kerja
000.8.3	Ketatalaksanaan
000.8.3.1	Proses Bisnis
000.8.3.2	Standar Pelayanan
000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur
000.8.3.4	Pelayanan Publik
000.8.4	Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional
000.8.5	Evaluasi Kelembagaan
000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
000.8.6.1	Budaya Kerja
000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
000.9	Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
000.9.1	Kebijakan di Bidang Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun

1	2
000.9.2	Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Meliputi Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian/Pengkajian/Rekomendasi
000.9.3	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan
000.9.4	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan
000.9.5	Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
000.9.6	Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
000.9.6.1	Data
000.9.6.2	Statistik
000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
000.9.7	<i>Master Proceeding</i> /Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
000.9.8	Hak Atas Kekayaan Intelektual
000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
000.9.10	Seminar, Lolakarya, Temukarya, <i>Workshop</i>
100	Pemerintahan
100.1	Otonomi Daerah
100.1.1	Kebijakan di Bidang Otonomi Daerah yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi)
100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Hubungan Antarlembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Bidang Pemerintahan
100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
100.1.4.5	Asosiasi Daerah
100.1.5	Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa
100.1.6	Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
100.1.6.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
100.1.6.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
100.1.6.3	Pengembangan Kapasitas Daerah
100.1.7	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Madiun (Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi)
100.2	Pemerintahan Umum
100.2.1	Kebijakan di Bidang Pemerintahan Umum yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerja Sama

1	2
100.2.2.1	Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah
100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan
100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum
100.2.3	Wilayah Adiministrasi dan Perbatasan
100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah
100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antarnegara
100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antarkecamatan, Batas Wilayah Antarkelurahan Satu Kecamatan, dan Batas Wilayah Kelurahan Antarkecamatan
100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah
100.3	Hukum
100.3.1	Program Legislasi
100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
100.3.1.2	Program Legislasi
100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, Termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal Sampai dengan Rancangan Akhir, dan Telaah Hukum Sampai Diundangkan
100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur
100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati
100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Wali Kota
100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
100.3.4	Instruksi/Surat Edaran
100.3.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi
100.3.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
100.3.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota
100.3.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
100.3.5	Surat Perintah
100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
100.3.5.3	Surat Perintah Wali Kota
100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis
100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum Of Understanding/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
100.3.7.1	Dalam Negeri
100.3.7.2	Luar Negeri
100.3.8	Dokumentasi Hukum, (antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan yang Dijadikan Referensi)
100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum

1	2
100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, dan Agama)
100.3.11	Kasus/Sengketa Hukum
100.3.11.1	Pidana Kasus/Sengketa Pidana, Baik Kejahatan Maupun Pelanggaran
100.3.11.2	Perdata Kasus/Sengketa Perdata
100.3.11.3	Tata Usaha Negara
100.3.11.4	Perburuhan
100.3.11.5	Arbitrase
100.3.11.6	Sengketa Adat
100.3.12	Perijinan
100.3.13	Hak Atas Kekayaan Intelektual
100.3.13.1	Hak Cipta
100.1.13.2	Hak Paten
100.1.13.3	Hak Desain Industri
100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
100.3.13.5	Hak Merk
100.3.14	Permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang Ditolak
200	Politik
200.1	Kesatuan Bangsa dan Politik
200.1.1	Kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara
200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan
200.1.2.3	Bela Negara
200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
200.1.3	Kewaspadaan Nasional
200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Keamanan
200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antarnegara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
200.1.4.1	Ketahanan Seni
200.1.4.2	Ketahanan Budaya
200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
200.1.4.5	Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
200.1.4.6	Fasilitasi
200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan dengan Organisasi Masyarakat/Lembaga Nonpemerintah Lainnya
200.1.4.9	Fasilitasi Aktifitas Organisasi Masyarakat: Sanksi Adminitrasi
200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Organisasi Masyarakat
200.1.4.11	Fasilitasi Organisasi Masyarakat
200.1.5	Politik Dalam Negeri
200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik

1	2
200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik yang Memperoleh Kursi
200.1.5.5	Partai Politik yang Tidak Memperoleh Kursi
200.1.5.6	Pemerintah Kota Madiun
200.1.5.7	<i>Database</i> Partai Politik
200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
200.1.5.9	Pemilihan Umum
200.1.6	Ketahanan Ekonomi
200.1.6.1	Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal, dan Moneter
200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
200.2	Pemilu
200.2.1	Kebijakan di Bidang Pemilu yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara
200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
200.2.2.4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Pemilih Tetap
200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
200.2.3.1	Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu dari Partai Politik
200.2.3.2	Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik
200.2.3.3	Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
200.2.3.4	Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual
200.2.4	Penetapan Persiapan Pemilihan Umum
200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
200.2.4.2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Pemilihan Rakyat
200.2.4.3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Pemilihan Rakyat
200.2.4.4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan
200.2.5	Pencalonan Pemilihan Umum
200.2.5.1	Petunjuk Teknis Pencalonan
200.2.5.2	Surat Pencalonan Pendaftaran
200.2.5.3	Daftar Bakal Calon
200.2.5.4	Dokumen Persyaratan Masing Masing Bakal Calon
200.2.5.5	Dokumen Verifikasi Administrasi
200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
200.2.6	Kampanye Pemilihan Umum
200.2.6.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Jadwal Kampanye
200.2.6.2	Nama Juru Kampanye/Pelaksana Kampanye
200.2.6.3	Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye
200.2.7	dana Kampanye
200.2.7.1	Pedoman Audit dana Kampanye
200.2.7.2	Laporan dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

1	2
200.2.7.3	Laporan Hasil Audit dana Kampanye
200.2.8	Pemungutan dan Perhitungan Suara
200.2.8.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain dan Spesifikasi Surat Suara
200.2.8.2	Master Surat Suara
200.2.8.3	Surat Suara yang Terpakai
200.2.8.4	Surat Suara Tidak Terpakai (Rusak, Salah, dan Tidak Digunakan)
200.2.8.5	Formulir Pemilu di Pemerintah Kota Madiun
200.2.9	Penetapan Hasil Pemilihan Umum
200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
200.2.10.1	Surat-Surat Mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
200.2.10.2	Jawaban dan Kesimpulan Termohon
200.2.10.3	Salinan Putusan Lembaga Peradilan
200.2.11	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilu
300	Keamanan dan Ketertiban
300.1	Satuan Polisi Pamong Praja
300.1.1	Kebijakan di Bidang Polisi Pamong Praja yang Dilakukan di Pemerintah Kota Madiun
300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
300.1.2.1	Tata Operasional Polisi Pamong Praja
300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
300.1.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja
300.1.4	Perlindungan Masyarakat
300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia
300.2	Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
300.2.1	Kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Madiun
300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
300.2.2.1	Rencana dan Standarisasi dan Pengawasan dan Perbekalan
300.2.2.2	Kurikulum dan Silabus, Evaluasi, dan Monitoring
300.2.2.3	Tenaga Pencairan Pertolongan, Penyiapan Potensi Pencairan, dan Pertolongan
300.2.2.4	Permasyarakatan Pencarian dan Pertolongan, Sertifikasi Pencairan dan Pertolongan
300.2.2.5	Perencanaan dan Standardisasi, Penyelenggaraan Operasi <i>Search and Rescue</i> , Siaga dan Latihan, Tempat Latihan
300.2.2.6	Registrasi <i>Beacon</i>
300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5	Bina Ketenagaan dan Permasyarakatan
300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan
300.2.5.2	Penyiapan Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5.3	Permasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5.4	Permasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi

1	2
300.2.8	Operasi Komunikasi
300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita <i>Search and Rescue</i>)
300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita <i>Search and Rescue</i>)
300.2.8.3	Registrasi Beacon
300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan
300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi
300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi
300.2.12	Pelaporan dan Evaluasi
300.2.12.1	Laporan Harian
300.2.12.2	Laporan Bulanan
300.2.12.3	Laporan Tahunan
300.2.12.4	Evaluasi
400	Kesejahteraan Rakyat
400.1	Pembangunan Daerah Tertinggal
400.1.1	Kebijakan di Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
400.1.2	Pembangunan Sumber Daya
400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan Ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.3	Fasilitasi Sumber Daya Hayati dan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, Energi, dan Lingkungan Hidup
400.1.2.5	Fasilitas Teknologi dan Inovasi
400.1.2.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.7	Pemantauan dan Evaluasi
400.1.3	Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi Dalam Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.3	Fasilitasi Sosial Dalam Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi Dalam Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.5	Fasilitasi Energi Dalam Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.7	Pemantauan dan Evaluasi
400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
400.1.4.1	Fasilitasi Investasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan Ekonomi dan Dunia Usaha
400.1.4.3	Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan Usaha
400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan Komoditas Unggulan
400.1.4.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
400.1.4.7	Pemantauan dan Evaluasi
400.1.4.8	Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Tertinggal
400.1.4.9	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Tertinggal
400.1.4.10	Monitoring dan Evaluasi Ekonomi Desa Tertinggal
400.1.4.11	Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Masyarakat dan Desa Tertinggal
400.1.4.12	Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa Tertinggal
400.1.4.13	Monitoring dan Evaluasi Masyarakat Tertinggal
400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa

1	2
400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
400.1.5.1	Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal
400.1.5.2	Penguatan Organisasi Masyarakat
400.1.5.3	Pemberdayaan Masyarakat
400.1.5.4	Kerja Sama Antarlembaga Sosial dan Budaya
400.1.5.5	Ketenagakerjaan
400.1.5.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
400.1.5.7	Pemantauan dan Evaluasi
400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus
400.1.6.1	Fasilitasi Pengembangan Daerah Perbatasan
400.1.6.2	Fasilitasi Pengembangan Daerah Rawan Konflik dan Bencana
400.1.6.3	Fasilitasi Pengembangan Daerah Perdesaan
400.1.6.4	Fasilitasi Pengembangan Daerah Pulau Terpencil dan Terluar
400.1.6.5	Fasilitasi Pengembangan Wilayah Strategis
400.1.6.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Khusus
400.1.6.7	Pemantauan dan Evaluasi
400.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
400.2.1	Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial, dan Hukum
400.2.2.1	Data Gender
400.2.2.2	Advokasi dan Fasilitasi
400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, dan Korban Perdagangan)
400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
400.2.3.2	Data Perlindungan Perempuan
400.2.3.3	Advokasi dan Fasilitasi
400.2.3.4	Monitoring, Evaluasi, dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan
400.2.3.5	Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender
400.2.3.6	Analisis dan Penyajian Informasi Gender
400.2.3.7	Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Ibu
400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, dan Anak Berhadapan dengan Hukum)
400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
400.2.4.2	Data Perlindungan Anak
400.2.4.3	Advokasi dan Fasilitasi
400.2.4.4	Monitoring, Evaluasi, dan Analisa Kebijakan Perlindungan Anak
400.2.4.5	Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Anak
400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan, dan Penanaman Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak
400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak
400.2.5.3	Data Tumbuh Kembang Anak
400.2.5.4	Advokasi dan Fasilitasi

1	2
400.2.5.5	Monitoring, Evaluasi, dan Analisa Kebijakan Tumbuh Kembang Anak
400.2.5.6	Penyelenggaraan <i>Parenting</i> Pola Pengasuhan Anak
400.2.6	Penghargaan Terkait Gender (Anugrah Parahita Ekapraya)
400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak
400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
400.3	Pendidikan
400.3.1	Kebijakan di Bidang Pendidikan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Informal
400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
400.3.2.2	Pelatihan Sosial
400.3.2.3	Peringatan Hari Anak
400.3.2.4	<i>Block Grant</i>
400.3.3	Pendidikan Masyarakat
400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
400.3.3.2	Penilaian dan Pemberian Bantuan Sosial
400.3.3.3	Pembinaan Program
400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
400.3.3.5	Pameran
400.3.3.6	Rakor
400.3.3.7	Sosialisasi
400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
400.3.5.1	Kurikulum, Bahan Ajar
400.3.5.2	<i>Block Grant</i>
400.3.5.3	Pelatihan, Bimbingan Teknis, Sosialisasi
400.3.5.4	Lomba, Penghargaan, Penganugerahan
400.3.5.5	Bantuan Operasional Sekolah
400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
400.3.6	Pendidikan Khusus/Layanan Khusus
400.3.6.1	Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu Pembelajaran
400.3.6.2	<i>Block Grant</i>
400.3.6.3	Lomba, Festival
400.3.6.4	Sosialisasi, Bimbingan Teknis
400.3.6.5	Pendataan
400.3.6.6	Kelembagaan
400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.7.1	Pendataan dan Pemetaan
400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
400.3.7.3	Sertifikasi Guru
400.3.7.4	Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan
400.3.7.5	Peningkatan Kesejahteraan Guru
400.3.7.6	Sosialisasi, Bimbingan Teknis
400.3.7.7	<i>Block Grant</i>
400.3.8	Sekolah Menengah Atas
400.3.8.1	Kurikulum
400.3.8.2	Bahan Ajar
400.3.8.3	Pelatihan
400.3.8.4	<i>Block Grant</i>
400.3.8.5	Bimbingan Teknis/Sosialisasi

1	2
400.3.8.6	Lomba, Sayembara, Festival
400.3.8.7	Bantuan Operasional Sekolah
400.3.8.8	Bantuan Siswa Miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus, Layanan Khusus
400.3.9.1	Bahan Ajar
400.3.9.2	Petunjuk Teknis
400.3.9.3	<i>Block Grant</i>
400.3.9.4	Sosialisasi, Bimbingan Teknis
400.3.9.5	Lomba, Sayembara, Jambore, Festival
400.3.9.6	Kurikulum/Bahan Pembelajaran
400.3.9.7	Alat Bantu Pembelajaran
400.3.9.8	Pendataan
400.3.9.9	Kelembagaan (Unit Kesehatan Sekolah, Pendidikan Jasmani Adaptif, Pendidikan Inklusi)
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
400.3.10.3	Sertifikasi Guru
400.3.10.4	Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Pengawas Sekolah
400.3.10.5	Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan
400.3.10.6	Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik
400.3.10.7	<i>Block Grant</i>
400.3.10.8	Bimbingan Teknis/Sosialisasi
400.3.11	Penilaian Pendidikan
400.3.11.1	Penilaian Akademik
400.3.11.2	Penilaian Nonakademik
400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan
400.3.12.1	Data Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan
400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan
400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
400.3.13.2	Sarana Pendidikan
400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi
400.4	Keolahragaan
400.4.1	Kebijakan di Bidang Keolahragaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
400.4.2	Pengelolaan Olah Raga Pendidikan
400.4.2.1	Olah Raga Pendidikan Dasar dan Menengah
400.4.2.2	Olah Raga Pendidikan Tinggi
400.4.2.3	Olah Raga Pendidikan Nonformal dan Informal
400.4.3	Pengelolaan Olah Raga Rekreasi
400.4.3.1	Olah Raga Massal
400.4.3.2	Olah Raga Tradisional
400.4.3.3	Olah Raga Petualangan, Tantangan dan Wisata
400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olah Raga
400.4.4.1	Olah Raga Pendidikan
400.4.4.2	Olah Raga Rekreasi
400.4.4.3	Olah Raga Prestasi
400.4.4.4	Sekolah Khusus Olah Raga
400.4.5	Pengembangan Olah Raga Tradisional dan Layanan Khusus
400.4.5.1	Olah Raga Tradisional

1	2
400.4.5.2	Layanan Khusus
400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga
400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
400.4.6.2	Penghargaan Olah Raga
400.4.7	Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olah Raga
400.4.7.1	Pembibitan Olah Raga
400.4.7.2	Kompetisi
400.4.7.3	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olah Raga
400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
400.4.9	Industri dan Promosi Olah Raga
400.4.9.1	Industri Olah Raga
400.4.9.2	Promosi Olah Raga
400.4.10	Olah Raga Prestasi
400.4.10.1	Daerah
400.4.10.2	Nasional
400.4.10.3	Internasional
400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olah Raga
400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
400.4.11.3	Infrastruktur Olah Raga
400.5	Kepemudaan
400.5.1	Kebijakan di Bidang Kepemudaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)
400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui Forum Kepemudaan)
400.5.2.3	Pengembangan
400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda
400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan
400.5.3.2	Wawasan Lingkungan
400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum
400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda
400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa
400.5.4.2	Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
400.5.4.3	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/Seni Kepemudaan)
400.5.5.1	Pengkajian
400.5.5.2	Pengembangan
400.5.5.3	Pendayagunaan (Fasilitasi)
400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
400.5.6.1	Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan, Pengembangan Kepedulian, Pendampingan
400.5.7	Kewirausahaan
400.5.7.1	Kelembagaan
400.5.7.2	Pengaderan
400.5.7.3	Perintisan
400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan

1	2
400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
400.5.9.1	Standardisasi
400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda
400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
400.5.10.1	Kemitraan
400.5.10.2	Penghargaan Pemuda
400.6	Kebudayaan
400.6.1	Kebijakan di Bidang Kebudayaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
400.6.2.1	Registrasi Nasional
400.6.2.2	Perlindungan
400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan
400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi
400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman
400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan
400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa
400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan Apresiasi Film
400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi
400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya
400.6.4.1	Sejarah
400.6.4.2	Pemetaan Nilai
400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi
400.6.4.5	Dokumentasi Sejarah dan Nilai Sejarah
400.6.4.6	Publikasi Sejarah dan Nilai Sejarah
400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
400.6.5.1	Internalisasi Nilai Budaya
400.6.5.2	Kekayaan Budaya
400.6.5.3	Warisan Budaya Nasional dan Dunia
400.6.5.4	Diplomasi Budaya
400.7	Kesehatan
400.7.1	Kebijakan di Bidang Kesehatan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar
400.7.2.1	Pelayanan Kedokteran Keluarga
400.7.2.2	Praktek Klinis Dokter di Pelayanan Kesehatan Primer
400.7.2.3	Pelaksanaan Kesehatan Primer
400.7.2.4	Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas
400.7.2.5	Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit
400.7.2.6	<i>International Classification of Diseases-10th Revision, Destistry, dan Stomatology</i>
400.7.2.7	Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah
400.7.2.8	Penyakit Mulut di Tingkat Primer

1	2
400.7.2.9	Pembiayaan Darah
400.7.2.10	Penggunaan Darah Rasional
400.7.2.11	Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Darah
400.7.2.12	Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Sangat Terpencil, dan Kepulauan
400.7.2.13	Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat
400.7.2.14	Pusat Kesehatan Masyarakat Berprestasi
400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan
400.7.3.1	Pelayanan Kesehatan Rujukan
400.7.3.2	Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi, dan Konsorsium Upaya Kesehatan
400.7.3.3	Pelayanan Rumah Sakit Privat
400.7.3.4	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
400.7.3.5	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan
400.7.3.6	Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan
400.7.3.7	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan Jasa
400.7.3.8	Badan Pengawas Rumah Sakit
400.7.3.9	Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan Penanam Modal Asing
400.7.3.10	Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya
400.7.4	Keperawatan dan Keteknisian Medik
400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
400.7.4.2	Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit
400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
400.7.4.5	Bina Pelayanan Kebidanan
400.7.5	Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
400.7.5.1	Mikrobiologi dan Imunologi
400.7.5.2	Patologi dan Toksikologi
400.7.5.3	Radiologi
400.7.5.4	Perijinan dan Sertifikasi
400.7.5.5	Sarana dan Prasarana Kesehatan
400.7.5.6	Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
400.7.5.7	Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan
400.7.6	Kesehatan Jiwa
400.7.6.1	Kesehatan Jiwa di Nonfasilitas Pelayanan Kesehatan
400.7.6.2	Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
400.7.6.3	Etikolegal dan Asesmen
400.7.6.4	Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Sejenisnya
400.7.6.5	Etiko <i>legal</i> dan Asesmen
400.7.6.6	Kesehatan Jiwa Kelompok Beresiko
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
400.7.7.1	Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa
400.7.7.2	Imunisasi
400.7.7.3	Karantina Kesehatan dan Kesehatan di Pelabuhan
400.7.7.4	Kesehatan Matra
400.7.8	Pengendalian Penyakit Menular Langsung
400.7.8.1	Pengendalian Tuberkolosis
400.7.8.2	Pengendalian <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> dan Penyakit Menular Seksual

1	2
400.7.8.3	Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut
400.7.8.4	Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan
400.7.8.5	Pengendalian Kusta dan Frambusia
400.7.9	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
400.7.9.1	Pengendalian Malaria
400.7.9.2	Pengendalian Arbovirosis
400.7.9.3	Pengendalian Zoonosis
400.7.9.4	Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
400.7.10	Pengendalian Penyakit Tidak Menular
400.7.10.1	Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
400.7.10.2	Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik
400.7.10.3	Penyakit Kanker
400.7.10.4	Penyakit Kronis dan Generatif
400.7.10.5	Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan
400.7.11	Penyehatan Lingkungan
400.7.11.1	Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar
400.7.11.2	Pemukiman dan Tempat Umum
400.7.11.2	Kawasan dan Sanitasi Darurat
400.7.11.4	Higien Sanitasi Pangan
400.7.11.5	Pengamanan Limbah, Udara, Radiasi
400.7.12	Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan
400.7.13	Gizi
400.7.13.1	Gizi Makro
400.7.13.2	Gizi Mikro
400.7.13.3	Gizi Klinik dan Dietetik
400.7.13.4	Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan
400.7.13.5	Kewaspadaan Gizi
400.7.14	Kesehatan Ibu
400.7.14.1	Kesehatan Ibu Hamil
400.7.14.2	Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas
400.7.14.3	Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi
400.7.14.4	Keluarga Berencana
400.7.14.5	Perlindungan Kesehatan Reproduksi
400.7.15	Kesehatan Anak
400.7.15.1	Kelangsungan Hidup Bayi
400.7.15.2	Kelangsungan Anak Balita dan Pra Sekolah
400.7.15.3	Kewaspadaan Penanganan Balita Beresiko
400.7.15.4	Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja
400.7.15.5	Perlindungan Kesehatan Anak
400.7.16	Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer
400.7.16.1	Kesehatan Tradisional Keterampilan
400.7.16.2	Kesehatan Tradisional Ramuan
400.7.16.3	Kesehatan Alternatif dan Komplementer
400.7.16.4	Penapisan dan Kemitraan
400.7.17	Kesehatan Kerja dan Olah Raga
400.7.17.1	Pelayanan Kesehatan Kerja
400.7.17.2	Kapasitas Kerja
400.7.17.3	Lingkungan Kerja
400.7.17.4	Kemitraan Kesehatan Kerja
400.7.17.5	Kesehatan Perkotaan

1	2
400.7.17.6	Kesehatan Olah Raga
400.7.18	Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
400.7.18.1	Harga Obat Publik
400.7.18.2	Pengadaan Obat
400.7.18.3	Perbekalan Kesehatan
400.7.19	Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
400.7.19.1	Alat Kesehatan
400.7.19.2	Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat
400.7.19.3	Produk Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
400.7.20	Kefarmasian
400.7.20.1	Pelayanan Kefarmasian
400.7.20.2	Farmasi Klinis
400.7.20.3	Farmasi Komunitas
400.7.20.4	Penggunaan Obat Rasional
400.7.21	Produksi dan Distribusi Kefarmasian
400.7.21.1	Obat Tradisional
400.7.21.2	Kosmetik dan Makanan
400.7.21.3	Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, dan Sediaan Farmasi Khusus
400.7.21.4	Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi, dan Perijinan
400.7.22.1	Surat Keterangan
400.7.22.2	Sertifikasi dan Perijinan
400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan
400.7.23.1	Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan
400.7.23.2	Tanggap Darurat dan Pemulihan
400.7.23.3	Pemantauan dan Informasi
400.7.23.4	Penanggulangan Krisis Kesehatan Dalam Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
400.7.23.5	Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
400.7.24.1	Tersedianya Data <i>National Health Accounts</i> Setiap Tahun
400.7.24.2	Tersedianya Dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
400.7.25	Intelegensia Kesehatan
400.7.25.1	Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan
400.7.25.2	Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan
400.7.26	Kesehatan Haji
400.7.26.1	Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji
400.7.26.2	Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji
400.7.27	Promosi Kesehatan
400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
400.7.27.2	Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran
400.7.27.3	Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan
400.7.27.4	Hari Kesehatan
400.7.28	Data dan Informasi
400.7.28.1	Statistik Kesehatan
400.7.28.2	Analisis dan Diseminasi Informasi
400.7.28.3	Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan

1	2
400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen
400.7.29.1	Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetik
400.7.29.2	Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen
400.7.29.3	Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen
400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
400.7.30.1	Penilaian Keamanan Pangan
400.7.30.2	Standardisasi Produk Pangan
400.7.30.3	Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan
400.7.30.4	Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan
400.7.30.5	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
400.7.31	Rekam Medis
400.8	Agama dan Kepercayaan
400.8.1	Kebijakan Dibidang Agama dan Kepercayaan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Madiun
400.8.2	Fasilitasi
400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama Prov./Kab./Kota
400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
400.8.2.3	Pelestarian Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
400.8.2.4	Kasus Keagamaan
400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan yang Maha Esa
400.8.3.1	Kelembagaan dan Kepercayaan
400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan
400.8.3.4	Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional
400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
400.9	Sosial
400.9.1	Kebijakan di Bidang Sosial yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak
400.9.2.1	Kesejahteraan Sosial Anak Balita
400.9.2.2	Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar
400.9.2.3	Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum
400.9.2.4	Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecatatan
400.9.2.5	Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus
400.9.3	Rehabilitasi Sosial
400.9.3.1	Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan Tubuh dan Bekas Penderita Penyakit Kronis, Netra dan Rungu Wicara, Mental
400.9.3.2	Kelembagaan dan Advokasi Sosial
400.9.3.3	Asistensi dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial
400.9.3.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
400.9.4.1	Gelandangan, Pengemis, dan Pemulung
400.9.4.2	Tuna Susila dan Korban Trafficking Perempuan
400.9.4.3	Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Meliputi Penyiapan, Reintegrasi

1	2
400.9.4.4	Pelayanan Sosial Orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> dan Kelompok Minoritas
400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
400.9.6	Pelayanan Sosial Lanjut Usia
400.9.6.1	Pelayanan Sosial Dalam dan Luar Panti
400.9.6.2	Pengembangan Kelembagaan Meliputi Pembinaan Lembaga, Kerja Sama Lembaga
400.9.6.3	Advokasi dan Pelayanan Sosial Kedaruratan
400.9.7	Pengumpulana dan Pengelolaan Sumber dana Bantuan Sosial
400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
400.9.9.1	Ketahanan Sosial Masyarakat Meliputi Keserasian Sosial, Penguatan Sumber Daya
400.9.9.2	Tanggap Darurat Meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial
400.9.9.3	Pemulihan Sosial Meliputi Penguatan Sosial, Reintegrasi Sosial
400.9.9.4	Kerja Sama Meliputi Kerja Sama Pemerintah, Kerja Sama Nonpemerintah
400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan Mitigasi
400.9.10.2	Tanggap Darurat Meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial
400.9.10.3	Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial
400.9.10.4	Kerja Sama
400.9.11	Jaminan Sosial
400.9.11.1	Seleksi dan Verifikasi
400.9.11.2	Asuransi Kesejahteraan Sosial Meliputi Kelembagaan, Pengelolaan Premi
400.9.11.3	Bantuan Langsung dan Tunjangan Berkelanjutan Meliputi Pendampingan dan Penyaluran
400.9.11.4	Kerja Sama
400.9.12	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
400.9.12.1	Ketahanan Keluarga
400.9.12.2	Asistensi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan
400.9.12.3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial
400.9.12.4	Kemitraan Dunia Usaha
400.9.12.5	Karang Taruna Meliputi Kelembagaan, Pengembangan Kapasitas
400.9.13	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
400.9.13.1	Persiapan Pemberdayaan
400.9.13.2	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
400.9.13.3	Penggalian dan Pengembangan Potensi
400.9.13.4	Keserasian dan Penguatan Komunitas Adat Terpencil
400.9.13.5	Kerja Sama Kelembagaan
400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
400.9.14.1	Identifikasi dan Analisis
400.9.14.2	Pengembangan Kapasitas
400.9.14.3	Penataan Sosial Lingkungan Kumuh
400.9.14.4	Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas
400.9.14.5	Bantuan Langsung
400.9.14.6	Kerja Sama Kelembagaan
400.9.15	Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial

1	2
400.9.15.1	Penghargaan dan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan
400.9.15.2	Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
400.9.15.3	Pengembangan Kesetiakawanan Sosial
400.9.15.4	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
400.10	Pemberdayaan Masyarakat Desa
400.10.1	Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa
400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa
400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
400.10.3.1	Lembaga Masyarakat
400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif
400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat
400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan
400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat
400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
400.10.4.1	Budaya Nusantara
400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan
400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial
400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan
400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat
400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan
400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran
400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga
400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
400.10.6	Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Pedesaan
400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerja Sama Teknologi Perdesaan
400.10.7	Badan Usaha Milik Desa
400.11	Pertamanan dan Pemakaman
400.11.1	Kebijakan di Bidang Pertamanan dan Pemakaman yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
400.11.2	Pertamanan
400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan
400.11.2.2	Taman Kota
400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota
400.11.3	Pemakaman
400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman
400.11.3.2	Pemakaman
400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman
400.11.4	Jalur Hijau
400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau

1	2
400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan
400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
400.11.5	Peran serta Masyarakat
400.11.6	Pengawasan dan Penindakan
400.11.7	Pengelolaan Data
400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan
400.12	Kependudukan dan Catatan Sipil
400.12.1	Kebijakan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
400.12.2	Pendaftaran Penduduk
400.12.2.1	Identitas Penduduk
400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antarnegara
400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan
400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.3	Pencatatan Sipil
400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian
400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian
400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan
400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.3	Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan
400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan
400.12.5.1	Kuantitas Penduduk
400.12.5.2	Kualitas Penduduk
400.12.5.3	Mobilitas Penduduk
400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
400.12.6	Penyerasian Kependudukan
400.12.6.1	Indikator Kependudukan
400.12.6.2	Proyeksi Penduduk
400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan
400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Nonpemerintah
400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
400.13	Keluarga Berencana
400.13.1	Kebijakan di Bidang Keluarga Berencana yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
400.13.2	Analisis Pengaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
400.13.2.1	Pengumpulan dan Pengolahan Data
400.13.2.2	Evaluasi dan Pelaporan
400.13.3	Fasilitasi Pengaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
400.13.3.1	Penyiapan Fasilitas
400.13.3.2	Evaluasi dan Pelaporan

1	2
400.13.4	Profil dan Proyeksi Penduduk
400.13.4.1	Data Profil dan Proyeksi Penduduk
400.13.4.2	Evaluasi dan Profil dan Proyeksi Penduduk
400.13.5	Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk
400.13.5.1	Penetapan Sasaran Parameter
400.13.5.2	Evaluasi Sasaran Parameter
400.13.6	Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk
400.13.6.1	Pemanfaatan Profil dan Proyeksi
400.13.6.2	Pemanfaatan Parameter
400.13.7	Pengembangan Sistem
400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.8	Pengembangan Materi
400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.9	Monitoring dan Evaluasi
400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.10	Analisis Sosial
400.13.11	Analisis Ekonomi
400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan, dan Keamanan
400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
400.13.15	Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana
400.13.16	Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
400.13.16.1	Standardisasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
400.13.16.2	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
400.13.17	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta
400.13.18	Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta
400.13.19	Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
400.13.19.1	Standardisasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
400.13.20	Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Jalur Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan
400.13.20.1	Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan
400.13.20.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan
400.13.21	Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan
400.13.21.1	Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan
400.13.21.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan
400.13.22	Kesertaan Keluarga Berencana Pria
400.13.22.1	Peningkatan Akses Keluarga Berencana Pria
400.13.22.2	Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana Pria
400.13.23	Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak

1	2
400.13.24	Pencegahan <i>Premenstrual Syndrome</i> dan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
400.13.25	Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas
400.13.26	Pelebagaan Bina Keluarga Balita dan Anak
400.13.26.1	Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak
400.13.26.2	Pengembangan Kemitraan Bina Keluarga dan Anak
400.13.27	Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Balita dan Anak
400.13.27.1	Monitoring Bina Keluarga Balita dan Anak
400.13.27.2	Evaluasi dan Pelaporan Bina Keluarga Balita dan Anak
400.13.28	Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja
400.13.28.1	Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan
400.13.28.2	Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Masyarakat
400.13.29	Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja
400.13.29.1	Monitoring Bina Ketahanan Remaja
400.13.29.2	Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Remaja
400.13.30	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia
400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Rentan
400.13.31	Pelebagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.32	Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.32.2	Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.33	Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga
400.13.34	Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga
400.13.35	Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga
400.13.35.1	Pengembangan Administrasi dan Keuangan Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga
400.13.35.2	Pengembangan Pemasaran Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga
400.13.36	Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Keluarga
400.13.37	Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.38	Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39.2	Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.40	Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi
400.13.40.1	Perencanaan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi
400.13.40.2	Evaluasi dan Pelaporan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi
400.13.41	Advokasi dan Pencitraan
400.13.42	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
400.13.42.1	Promosi
400.13.42.2	Sarana Produksi Media Komunikasi

1	2
400.13.42.3	Produk Media Komunikasi
400.13.43	Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi
400.13.44	Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota
400.13.44.1	Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota
400.13.44.2	Penguatan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota
400.13.45	Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah
400.13.45.1	Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah
400.13.45.2	Penguatan Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah
400.13.46	Tenaga Lini Lapangan
400.13.46.1	Pengembangan Tenaga Lini Lapangan
400.13.46.2	Monitoring dan Evaluasi Tenaga Lini Lapangan
400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan
400.13.47.1	Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan
400.13.47.2	Monitoring dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan
400.13.48	Mekanisme Operasional Lini Lapangan
400.13.48.1	Pengembangan Mekanisme Operasional Lini Lapangan
400.13.48.2	Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan
400.13.49	Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan
400.13.49.1	Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan
400.13.49.2	Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan
400.13.50	Pengumpulan dan Pengolahan Data
400.13.51	Analisis dan Evaluasi
400.13.51.1	Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk
400.13.51.2	Analisis dan Evaluasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
400.13.52	Sistem Aplikasi dan Bank Data
400.13.52.1	Pengembangan Sistem Aplikasi
400.13.52.2	Pengelolaan Bank Data
400.13.53	Infrastruktur Teknologi Informasi
400.13.53.1	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi
400.13.53.2	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi
400.13.54	Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi
400.13.54.1	Dokumentasi dan Perpustakaan
400.13.54.2	Pengelolaan Situs BKKBN dan Media Konferensi
400.14	Hubungan Masyarakat
400.14.1	Keprotokolan
400.14.1.1	Penyelenggaraan Acara Kedinasan (Upacara, Pelantikan, Perseminan, dan Jamuan Termasuk Acara Peringatan Hari Besar)
400.14.1.2	Buku Tamu Keprotokolan
400.14.1.3	Agenda Kegiatan Pimpinan Daerah
400.14.1.4	Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri
400.14.2	Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat
400.14.3	Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan dan Peristiwa Bidang Masing-masing, Dalam Berbagai Media: Kertas, Foto/Video/ Rekaman Suara/ Multimedia
400.14.4	Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Informasi Kelembagaan
400.14.4.1	Kliping Koran
400.14.4.2	Brosur/Leaflet/Poster/Plakat

1	2
400.14.4.3	Pengumuman/Pemberitaan
400.14.5	Hubungan Antarlembaga dan Pemerintahan Daerah
400.14.5.1	Hubungan Antarlembaga Pemerintah
400.14.5.2	Hubungan dengan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat
400.14.5.3	Hubungan dengan Perusahaan
400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, Termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda/Praktek Kerja Lapangan
400.14.5.5	Forum Kehumasan
400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa
400.14.6	Dengar Pendapat/ <i>Hearing</i> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
400.14.7	Bahan/Materi Pidato/Sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
400.14.8	Penerbitan Majalah, Buletin, Koran, dan Jurnal
400.14.9	Publikasi Melalui Media Cetak Maupun Elektronik
400.14.10	Pameran/Sayembara/Lomba/Festifal, Pembuatan Spanduk, dan Iklan
400.14.11	Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan
400.14.12	Ucapan Terima Kasih/ Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf
500	Perekonomian
500.1	Ketahanan Pangan
500.1.1	Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan yang Dilakukan Pemerintah Kota Madiun
500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
500.1.2.1	Ketersediaan Pangan
500.1.2.2	Akses Pangan
500.1.2.3	Kerawanan Pangan
500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan
500.1.3.1	Distribusi Pangan
500.1.3.2	Harga Pangan
500.1.3.3	Cadangan Pangan
500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
500.1.4.1	Konsumsi Pangan
500.1.4.2	Penganekaragam Pangan
500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar
500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan
500.1.5.2	Penghargaan Ketahanan Pangan
500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
500.1.7	Bimbingan Teknis
500.1.8	Evaluasi
500.2	Perdagangan
500.2.1	Kebijakan di Bidang Perdagangan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri
500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
500.2.2.2	Bina Usaha Jasa Perdagangan
500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
500.2.2.4	Informasi Perusahaan
500.2.2.5	Pelaku Pasar
500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah

1	2
500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal
500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri
500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi
500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
500.2.2.12	Kerja Sama Pengembangan Sistem Logistik
500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
500.2.2.14	Informasi Pasar
500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
500.2.2.16	Barang Strategis
500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
500.2.3	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
500.2.3.1	Kelembagaan dan Informasi Standar
500.2.3.2	Kerja Sama Standardisasi
500.2.3.3	Perumusan dan Penerapan Standar
500.2.3.4	Tata Usaha
500.2.3.5	Kerjasama, Informasi, dan Publikasi
500.2.3.6	Analisa Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
500.2.3.7	Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha
500.2.3.8	Fasilitas Kelembagaan
500.2.3.9	Produk Pertambangan dan Aneka Industri
500.2.3.10	Produk Pertanian, Kimia, dan Kehutanan
500.2.3.11	Jasa
500.2.3.12	Kerja Sama
500.2.3.13	Sarana dan Kerja Sama
500.2.3.14	Kelembagaan dan Penilaian
500.2.3.15	Uttp dan Standar Ukuran
500.2.3.16	Pengawasan
500.2.3.17	Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
500.2.3.18	Balai Pengujian Uttp
500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi
500.2.4.1	Pengkajian Pasar
500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
500.2.4.4	Pengkajian Pasar
500.2.4.5	Pengembangan Pasar
500.2.4.6	Sistem Informasi
500.2.4.7	Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang
500.2.4.8	Pengawasan Pasar Lelang
500.2.4.9	Pengawasan Sistem Gudang
500.2.5	Bimbingan Teknis
500.2.6	Evaluasi
500.3	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
500.3.1	Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Madiun
500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan Ukm
500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan Ukm
500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
500.3.3	Produksi

1	2
500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
500.3.3.3	Perikanan dan Pertenakan
500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
500.3.4	Pembiayaan
500.3.4.1	Program Pendanaan
500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
500.3.4.3	Urusan Permodalan
500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
500.3.4.6	Lembaga Pengelola dana Bergulir Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha
500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
500.3.5.2	Ekspor dan Impor
500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran/Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia
500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
500.3.6.3	Peran serta Masyarakat
500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
500.3.6.5	Advokasi
500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis
500.3.7.4	Fasilitasi Investasi Ukmk
500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
500.3.8	Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi
500.3.8.1	Penelitian Koperasi
500.3.8.2	Penelitian Usaha Kecil Menengah
500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan Usaha Kecil Menengah
500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga
500.3.10	Pedagang Kaki Lima
500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan
500.3.10.2	Sarana dan Prasarana
500.3.11	Monitoring dan Evaluasi
500.4	Kehutanan
500.4.1	Kebijakan di Bidang Kehutanan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
500.4.2	Penyuluhan
500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan
500.4.2.2	Materi Penyuluhan
500.4.2.3	Program Penyuluhan
500.4.2.4	Sarana Penyuluhan
500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan
500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan
500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat

1	2
500.4.2.8	Deseminasi
500.4.2.9	Evaluasi dan Laporan
500.4.3	Planologi Kehutanan
500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan
500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
500.4.4	Bina Usaha Kehutanan
500.4.4.1	Data Areal Hak Pengusahaan Hutan/ Hutan Tanaman Industri/ Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu
500.4.4.2	Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan/ Hutan Tanaman Industri/ Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu
500.4.4.3	Kerja Sama
500.4.4.4	Pembatalan/ Penolakan
500.4.4.5	Perpanjangan
500.4.4.6	Modal dan Peralatan
500.4.4.7	Investasi Industri
500.4.4.8	Peralatan
500.4.4.9	Tenaga Kerja
500.4.4.10	Pemegang Saham
500.4.4.11	Neraca Perusahaan
500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan
500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan
500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan
500.4.4.16	Target Produksi Rencana Kerja Tahunan dan Beban Kerja
500.4.4.17	Produksi Kayu
500.4.4.18	Produksi Nonkayu
500.4.4.19	Industri Kayu Hak Pengusahaan Hutan/ Hutan Tanaman Industri/ Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu
500.4.4.20	Industri Kayu Non Hak Pengusahaan Hutan/ Hutan Tanaman Industri/ Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu
500.4.4.21	Industri Nonkayu
500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
500.4.4.25	Pemblokiran
500.4.4.26	Denda
500.4.4.27	Pencabutan Areal Hak Pengusahaan Hutan/ Hutan Tanaman Industri/ Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu

1	2
500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
500.4.4.48	Pembinaan Hak Pengusahaan Hutan/Hutan Tanaman Industri/Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu
500.4.4.49	Pembinaan Tebang Pilih Tanam Indonesia/Tebang Pilih Tanam Jalur/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan
500.4.5.1	Standardisasi
500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
500.4.5.3	Pengembangan
500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
500.4.6.5	Kawasan Konservasi
500.4.6.6	Pengamanan Hutan
500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
500.4.6.11	Bina Cinta Alam
500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam

1	2
500.4.6.13	Data Organisasi Pencinta Alam dan Kader Konservasi Sumber Daya Alam
500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
500.4.7.1	Pengelolaan Benih
500.4.7.2	Kebun Benih
500.4.7.3	Tegakan Benih
500.4.7.4	Pengadaan Benih
500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
500.4.7.7	Pembibitan
500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih
500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
500.4.7.14	Perhutanan Sosial
500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Kehutanan
500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
500.4.8.3	Diseminasi
500.4.8.4	Gelar Teknologi
500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.5	Kelautan dan Perikanan
500.5.1	Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Madiun
500.5.2	Perikanan Tangkap
500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
500.5.2.5	Pengawasan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
500.5.2.12	Kelembagaan Usaha Penangkapan
500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
500.5.2.14	Kenelayanan
500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.3	Perikanan Budi Daya
500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan Ikan Air Tawar
500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenuhan
500.5.3.6	Budi Daya Air Tawar
500.5.3.7	Budi Daya Ikan Hias
500.5.3.8	Sertifikasi Budi Daya Perikanan

1	2
500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budi Daya
500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budi Daya
500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budi Daya
500.5.3.13	Kewirausahaan Budi Daya
500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budi Daya
500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagakerjaan
500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
500.5.4.1	Standardisasi Pengolahan Hasil
500.5.4.2	Pengembangan Produk
500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
500.5.4.4	Industri Pengolahan
500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
500.5.4.6	Standardisasi Pengembangan Produk Nonkonsumsi
500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
500.5.4.8	Pengembangan Industri
500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produksi Nonkonsumsi
500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
500.5.4.18	Pengembangan Impor
500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
500.5.4.20	Pelayanan Usaha
500.5.4.21	Kemitraan Usaha
500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Luat Nasional dan Perairan Yurisdiksi
500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
500.5.5.6	Konservasi Wawasan
500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau Terkecil
500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau Terkecil
500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau Terkecil
500.5.5.17	Akses Permodalan
500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat

1	2
500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran
500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budi Daya
500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Nonhayati
500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
500.5.6.12	Pengawasan Kapal Pengawas
500.5.6.13	Sistem Pemantauan
500.5.6.14	Pemantauan Pemfaatan Sumber Daya Kelautan
500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
500.5.6.17	Penyidikan
500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas Ppns Perikanan
500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penaganan Pelanggaran
500.5.7	Karantina Ikan
500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
500.5.7.2	Penahanan
500.5.7.3	Pengasingan
500.5.7.4	Pengamatan
500.5.7.5	Pengakuan
500.5.7.6	Penolakan
500.5.7.7	Pemusnahan
500.5.7.8	Persyaratan Lalu Lintas Pemasukan
500.5.7.9	Persyaratan Lalu Lintas Pengeluaran
500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
500.5.7.11	Pemasukan Formulir
500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
500.5.7.14	Surat Perintah
500.5.7.15	Rekomendasi
500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
500.5.7.21	Lokasi Karantina
500.6	Pertanian
500.6.1	Kebijakan di Bidang Pertanian yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
500.6.2	Perlindungan Hortikultura
500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
500.6.2.4	Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis
500.6.3	Perbenihan Hortikultura
500.6.3.1	Penilaian Varietas
500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
500.6.3.3	Budi Daya dan Pascapanen Florikultura
500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan
500.6.4.1	Basis Data Lahan
500.6.4.2	Pengendalian Lahan
500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi, dan Konservasi Lahan

1	2
500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan
500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi
500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air, dan Lingkungan Hidup
500.6.5.4	Kelembagaan
500.6.6	Pembiayaan Pertanian
500.6.6.1	Pembiayaan Program
500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
500.6.6.3	Pembiayaan Agribisnis
500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis
500.6.7	Pupuk Pestisida
500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah
500.6.7.2	Pupuk Anorganik
500.6.7.3	Pestisida
500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian
500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan
500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
500.6.9.4	Kelembagaan Benih
500.6.10	Budi Daya Serealia
500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
500.6.10.3	Jagung
500.6.10.4	Serealia Lain
500.6.11	Budi Daya Aneka Kacang dan Umbi
500.6.11.1	Kedelai
500.6.11.2	Ubi Kayu
500.6.11.3	Aneka Kacang
500.6.11.4	Aneka Umbi
500.6.12	Tanaman Pangan
500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu
500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan
500.6.13.1	Padi
500.6.13.2	Jagung dan Serealia Alin
500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
500.6.13.4	Aneka Umbi
500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian
500.6.14.1	Tanaman Pangan
500.6.14.2	Hortikultura
500.6.14.3	Perkebunan
500.6.14.4	Peternakan
500.6.15	Mutu dan Standardisasi
500.6.15.1	Standardisasi
500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
500.6.15.4	Kerja Sama dan Harmonisasi

1	2
500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi
500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
500.6.16.2	Investasi
500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
500.6.17	Pemasaran Domestik
500.6.17.1	Informasi Pasar
500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain Rencana Kerja, <i>Term of Reference</i> /Proposal, Pembentukan Tim Kerja, dan Surat Menyurat
500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategis
500.6.20	Diseminasi
500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian
500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi Lainnya
500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan
500.6.25	Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan
500.6.26	Hak Atas Kekayaan Intelektual
500.6.26.1	Hak Cipta
500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
500.6.26.3	Hak Paten Biasa
500.6.26.4	Hak Merek
500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
500.6.26.6	Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Tanaman Semusim dan Tahunan
500.6.26.7	Permohonan Hak Kekayaan Intelektual yang Ditolak
500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian
500.6.27.1	Sarana I (Bidang Pupuk, Petisida, Alat, dan Mesin Pertanian)
500.6.27.2	Sarana II (Bidang Benih Tanaman, Bahan Penelitian, Teknis Pangan Segar Asal Tumbuhan, Teknis Pengalihan Saham Perkebunan)
500.6.27.3	Sarana III (Bidang Bibit, Karkas, Daging, dan Jeroan, Pakan Ternak, Obat Hewan, dan Teknis Sumber Daya Genetik Ternak)
500.6.28	Pelayanan Hukum
500.6.28.1	Sertifikasi
500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
500.6.29	Karantina Pertanian
500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
500.6.29.2	Karantina Hewan
500.6.30	Bimbingan Teknis
500.6.31	Evaluasi
500.7	Peternakan
500.7.1	Kebijakan di Bidang Peternakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan
500.7.2.1	Perbibitan Ternak, antara lain Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Nonruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak, Pengembangan Bibit Ternak Surat Rekomendasi, dan Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran

1	2
500.7.2.2	Pakan Ternak
500.7.2.3	Budi Daya Ternak
500.7.2.4	Kesehatan Hewan, antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan
500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi, dan Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran
500.7.3	Bimbingan Teknis
500.7.4	Evaluasi
500.8	Perkebunan
500.8.1	Kebijakan di Bidang Perkebunan yang Dilakukan oleh Pemerintahan Daerah
500.8.2	Tanaman Semusim
500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim
500.8.2.3	Budi Daya Teknologi Budi Daya Tanaman Semusim
500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim
500.8.3	Tanaman Rempah dan Penyegar
500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar
500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar
500.8.3.3	Budi Daya Tanaman Rempah dan Penyegar
500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar
500.8.4	Tanaman Tahunan
500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan
500.8.4.3	Budi Daya Tanaman Tahunan
500.8.4.4	Perbedayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
500.8.5	Perlindungan Perkebunan
500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha
500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar
500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan
500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan
500.8.8	Evaluasi Perkebunan
500.9	Perindustrian
500.9.1	Kebijakan di Bidang Perindustrian yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama
500.9.2.1	Industri Manufaktur
500.9.2.2	Industri Agro
500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.3	Promosi Industri

1	2
500.9.3.1	Industri Manufaktur
500.9.3.2	Promosi Industri Agro
500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.4	Standardisasi dan Teknologi
500.9.4.1	Industri Manufaktur
500.9.4.2	Industri Agro
500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.5	Hak dan Kekayaan Intelektual
500.9.5.1	Industri Manufaktur
500.9.5.2	Industri Agro
500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.6	Industri Hijau
500.9.6.1	Industri Manufaktur
500.9.6.2	Industri Agro
500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
500.9.12	Standardisasi
500.9.12.1	Standar
500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
500.9.12.3	Infrastruktur Standar
500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
500.9.13.1	Kebijakan Industri
500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif
500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial
500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
500.9.14.1	Industri Hijau
500.9.14.2	Lingkungan Hidup
500.9.14.3	Energi
500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri
500.10	Energi dan Sumber Daya Mineral
500.10.1	Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
500.10.2	Rekomendasi Kegeologian
500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.2.3	Pertambangan
500.10.2.4	Panas Bumi
500.10.2.5	Geosains
500.10.2.6	Pengukuran <i>Time Domain Electromagnetic</i>
500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan
500.10.3	Penelitian Kegeologian
500.10.3.1	Administrasi Pelaksanaan Penelitian

1	2
500.10.3.2	Administrasi Tenaga Penelitian
500.10.3.3	Administrasi Penggunaan Peralatan Penelitian
500.10.3.4	<i>Log-Book</i> Peralatan Survei/Peralatan Uji/Kalibrasi
500.10.3.5	Hasil Penelitian dan Penyelidikan Kegeologian
500.10.3.6	Sumber Daya Geologi
500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
500.10.3.9	Survei Geologi
500.10.4	Inventarisasi dan Evaluasi Kegeologian
500.10.4.1	Sumber Daya Geologi
500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.4.4	Survei Geologi
500.10.4.5	Konservasi
500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
500.10.5.1	Peta Potensi dan Sebaran
500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas, serta Kebakaran Batu Bara
500.10.5.4	Survei Geologi
500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
500.10.6.4	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak dan Gas Bumi
500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Penerimaan Negara Bukan Pajak
500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri
500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang dan Rencana Impor Barang
500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Nonkonvensional)
500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas Untuk Presentasi Makalah, Publikasi Makalah, Pembukaan Data, Izin Pengiriman Data Ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data Ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Per Semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (Publikasi Makalah, Analisa Laboratorium, <i>Reprocessing</i>), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)

1	2
500.10.7.4	Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi
500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak Kerja Sama
500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
500.10.7.7	Partisipasi Interest
500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
500.10.8.1	Perumusan Pedoman, Prosedur, Layanan serta Pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/Rekomendasi/Penandasahan), Pengawasan
500.10.8.2	Fasilitasi dan Pertimbangan Pelanggaran
500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang Ditetapkan dengan Keputusan Menteri
500.10.9	Teknik dan Lingkungan
500.10.9.1	Perumusan Pelaksanaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar, antara lain: Berkas Permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikasi Nomor Pelumas Terdaftar, Register Nomor Pelumas Terdaftar
500.10.9.3	Buku Register <i>Welding Procedure Specification/Procedure Qualification Record</i>
500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, antara lain Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukan Kepala/Wakil Kepala Teknis Tambang Hulu dan Hilir, antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan Persetujuan Penunjukan Calon Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/Pengesahan Penunjukan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambangan Minyak dan Gas Bumi
500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, antara lain Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
500.10.9.10	Usaha Penunjang
500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Kota Madiun dan Lembaga
500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi

1	2
500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari Energi Baru dan Terbarukan
500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari Ebt
500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
500.10.11.7	<i>Road Map</i> di Bidang Energi Baru dan Terbarukan
500.10.12	Panas Bumi
500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar
500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi
500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
500.10.12.5	Perizinan Penggunaan Gudang Bahan Peledak
500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
500.10.12.7	Persetujuan Sertifikasi <i>Welding Prosedure Specification</i> dan <i>Prosedure Qualification Record</i> dan Kualifikasi Juru <i>Lasqualification Record</i> dan Kualifikasi Juru Las
500.10.12.8	Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi
500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi
500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung
500.10.12.11	Penetapan Kapasitas Usaha Panas Bumi
500.10.12.12	Penetapan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi, dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi
500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati
500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati
500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor-Import
500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar Bahan Bakar Nabati
500.10.13.5	Evaluasi/Revisi Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati
500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi
500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha Sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas Untuk Pembangkit Listrik
500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Kota Madiun dan Lembaga
500.10.14	Aneka Energi
500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang
500.10.15	Konservasi Energi
500.10.15.1	Audit Energi Melalui Program Kemitraan Konservasi Energi
500.10.15.2	Monitoring Implementasi Hasil Audit Energi Melalui Program Kemitraan Konservasi Energi
500.10.15.3	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Manajemen Energi di Pengguna Energi di Atas 6.000 Toe
500.10.15.4	Pengawasan Sertifikasi Label dan Tanda Hemat Energi Pada Lampu Swabalast
500.10.15.5	Penyusunan Daftar Peralatan/Teknologi Efisiensi
500.10.15.6	Penyusunan Emisi Energi Gas Rumah Kaca
500.10.15.7	Pemberian Insentif dan Disinsentif Konservasi Energi
500.10.15.8	Profil Investasi Efisiensi Energi

1	2
500.10.15.9	<i>Investment Grade Audit</i>
500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kota Madiun dan Lembaga
500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik
500.10.17.1	Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, antara lain Dokumen <i>Grant/Hibah/Loan Agreement</i> Luar Negeri, Monitoring <i>Loan</i> Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik, Laporan Penanganan Permasalahan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik, Laporan Kegiatan Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik
500.10.17.2	Pengembangan Listrik Pedesaan, antara lain Data Program Listrik Pedesaan, Data Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik, Monitoring dan Evaluasi Listrik Pedesaan, Listrik Untuk Masyarakat Tidak Mampu
500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan
500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistrikan
500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, antara lain Pelayanan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Izin Operasi, Izin Usaha Pertambangan L-S, dan Izin Usaha Pertambangan L), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data Laporan Berkala Pemegang Izin
500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
500.10.18.3	Hubungan Komersial Tenaga Listrik
500.10.18.4	Perlindungan Konsumen Listrik, antara lain Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik, Dokumen Pengawasan Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik, Dokumen Evaluasi Realisasi Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik, Dokumen Evaluasi Pemberian Kompensasi Pinalti Tingkat Mutu Pelayanan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero)
500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
500.10.19.1	Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan
500.10.19.2	Penyiapan Kompetensi dan Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
500.10.19.3	Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, antara lain Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telematika, Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang
500.10.19.4	Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen Forum Keselamatan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sektor Ketenagalistrikan, Laporan Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan, Dokumen Perhitungan Faktor Emisi <i>Clean Development Mechanism</i>
500.10.20	Sertifikasi
500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi
500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik

1	2
500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik
500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan
500.10.22	Standardisasi Kompetensi
500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia Bidang Ketenagalistrikan
500.10.23.1	Perumusan Rancangan Sni Bidang Ketenagalistrikan
500.10.23.2	Forum Konsensus Rancangan Sni Bidang Ketenagalistrikan
500.10.23.3	Program Pemberlakuan Sni Wajib Bidang Ketenagalistrikan
500.10.23.4	Dokumen Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia Wajib Bidang Ketenagalistrikan
500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
500.10.24.1	Klasifikasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
500.10.24.2	Kualifikasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
500.10.24.3	Dokumen Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknis
500.10.24.4	Laporan Berkala Pemegang Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknis
500.10.24.5	Laporan Hasil Pengawasan Penunjukan
500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara
500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja Mineral dan Batubara Melalui Lelang Reguler
500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral
500.10.26.1	Ketenagakerjaan
500.10.26.2	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang
500.10.26.3	Penyelesaian Perselisihan Usaha Pertambangan Mineral
500.10.26.4	Rekomendasi Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
500.10.26.5	Laporan/Data Kegiatan Eksplorasi Mineral
500.10.26.6	Pengawasan Produksi dan Pemasaran Mineral (Logam, Bukan Logam Batuan, Radioaktif, dan Mineral Jarang)
500.10.26.7	Perizinan Usaha Pertambangan Mineral
500.10.26.8	Kontrak Karya
500.10.26.9	Pengelolaan Barang Kontrak Karya
500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional
500.10.26.11	Persetujuan Perubahan Saham Direksi, Komisaris, Pada Perusahaan Mineral
500.10.26.12	Teguran Kepada Pengusahaan Kontrak Karya
500.10.26.13	Tanggapan Kepada Pemerintah Kota Madiun Terkait Usaha Pertambangan Mineral
500.10.26.14	Pedoman/Petunjuk Teknis Pertambangan Mineral Termasuk Rancangan Awal Sampul dengan Rancangan Akhir
500.10.26.15	Pelaporan Usaha Pertambangan Mineral
500.10.26.16	Penghargaan Usaha Pertambangan Mineral
500.10.26.17	Penerbitan Sertifikat <i>Clear and Clean</i> , Izin Usaha Pertambangan Mineral
500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara
500.10.27.1	Ketenagakerjaan
500.10.27.2	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang
500.10.27.3	Penyelesaian Perselisihan Usaha Pertambangan Batubara
500.10.27.4	Rekomendasi Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara

1	2
500.10.27.5	Laporan/Data Kegiatan Eksplorasi Batu Bara
500.10.27.6	Pengawasan Produksi dan Pemasaran Batu Bara (Bitumen Padat, Batuan Aspal, Batu Bara dan Gambut), antara lain Laporan Produksi dan Penjualan Batu Bara, Izin Usaha Pertambangan Hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batu Bara
500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batu Bara
500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara
500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara antara lain Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)
500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional
500.10.27.11	Persetujuan Perubahan Saham Direksi, Komisaris, Pada Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara
500.10.27.12	Teguran Kepada Pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara
500.10.27.13	Tanggapan Kepada Pemerintah Kota Madiun Terkait Usaha Pertambangan Batu Bara
500.10.27.14	Pedoman/Petunjuk Teknis Pertambangan Mineral Termasuk Rancangan Awal Sampul dengan Rancangan Akhir
500.10.27.15	Pelaporan Usaha Pertambangan Batu Bara
500.10.27.16	Penghargaan Usaha Pertambangan Batu Bara
500.10.27.17	Penerbitan Sertifikat <i>Clear and Clean</i> , Izin Usaha Pertambangan Batu Bara
500.10.28	Penerimaan Negara
500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak
500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian
500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara
500.10.29.1	Perumusan Rsn (Rancangan Standar Nasional Indonesia) (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), antara lain Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional
500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik Hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.10.29.5	Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang, antara lain Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
500.10.29.8	Rekomendasi Bahan Kimia
500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan Hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
500.10.29.10	Laporan Berkala Teknik dan Lingkungan Pertambangan/ Laporan Tahunan, antara lain Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran Pelaksanaan Reklamasi
500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, antara lain Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
500.10.29.12	Pengawasan Lingkungan Pertambangan
500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
500.10.29.14	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Mineral dan Batubara

1	2
500.10.29.15	Rekomendasi Teknis, antara lain Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi
500.10.29.16	Persetujuan Teknis, antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi
500.10.29.17	Pengawasan Teknis
500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
500.10.29.19	Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, antara lain Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis
500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan
500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
500.10.30.2	Pengembangan dan Inovasi
500.10.30.3	Dokumen Penerapan/Pemanfaatan/Pendayagunaan/ Replikasi/Prototipe Hasil Penelitian/Pengkajian/ Pengembangan/Inovasi
500.10.30.4	Advokasi dan Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
500.10.30.5	Diseminasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
500.10.30.6	Pembinaan Penelitian/Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
500.10.30.8	Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
500.10.30.9	<i>Master Proceeding</i> /Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
500.10.30.10	Hak Atas Kekayaan Intelektual
500.10.30.11	Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
500.10.30.12	Layanan Jasa Penelitian, Pengembangan, Penerapan
500.10.30.13	Sertifikasi Personil Peneliti Bidang Sumber Daya Mineral
500.10.31	Sarana Litbang
500.10.31.1	Administrasi Penggunaan Peralatan
500.10.31.2	<i>Log-Book</i> Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
500.10.32	Afiliasi
500.10.32.1	Proyek Percontohan
500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
500.10.32.4	Penyajian Informasi
500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian
500.10.33.1	Pemetaan dan Penelitian Geologi, Geokimia, dan Geofisika Kelautan
500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan Kewilayahan Pantai
500.10.33.3	Penelitian Sumber Daya Energi dan Mineral Kelautan
500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
500.10.34.3	Laboratorium
500.10.34.4	<i>Study</i>
500.10.34.5	Teknologi Proses
500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
500.10.34.7	Teknologi Gas
500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batu Bara
500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Mineral

1	2
500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batu Bara
500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
500.10.36.1	Energi Baru Terbarukan
500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan
500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi
500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi
500.11	Perhubungan
500.11.1	Kebijakan di Bidang Perhubungan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Madiun
500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan
500.11.2.1	Penentuan Lokasi Terminal Barang Tipe Pengumpul dan Tipe Penunjang
500.11.2.2	Penentuan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C
500.11.2.3	Penetapan Lokasi Terminal Barang Utama
500.11.2.4	Standar Pelayanan Minimal Pengoperasian Terminal
500.11.2.5	Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota/Provinsi
500.11.2.6	Jaringan Lintas Pada Jaringan Jalan Primer
500.11.2.7	Penetapan Kelas Jalan Primer
500.11.2.8	Kualifikasi Teknis Petugas Terminal
500.11.2.9	Jaringan Transportasi Jalan Sekunder
500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan
500.11.3.1	Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
500.11.3.2	Pengembangan Transportasi Jalan
500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor
500.11.4.1	Pengesahan Hasil Uji Tipe Kendaraan Bermotor
500.11.4.2	Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor
500.11.4.3	Sertifikasi Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor
500.11.4.4	Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor
500.11.5.1	Sertifikasi Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
500.11.5.2	Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
500.11.5.3	Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor
500.11.5.4	Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Kendaraan Bermotor
500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
500.11.6.1	Analisa Dampak Lalu Lintas Jalan Nasional di Luar Kawasan Perkotaan
500.11.6.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional
500.11.7	Perlengkapan Jalan
500.11.7.1	Pedoman Teknis Perlengkapan Jalan
500.11.7.2	Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
500.11.7.3	Akreditasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor
500.11.7.4	Kualifikasi Teknis Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor
500.11.7.5	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional
500.11.8	Angkutan Penumpang
500.11.8.1	Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi
500.11.8.2	Izin Trayek Angkutan Penumpang Untuk Trayek Lintas Batas Negara
500.11.8.3	Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi
500.11.8.4	Izin Operasi Angkutan Pariwisata dan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Bersifat Lintas Batas Negara & Antar Kota/Provinsi
500.11.8.5	Penilaian Kinerja Perusahaan Angkutan Umum
500.11.8.6	Pemberian Subsidi Angkutan Umum
500.11.8.7	Angkutan Perintis
500.11.8.8	Penghargaan Perusahaan Angkutan Umum

1	2
500.11.9	Angkutan Barang
500.11.9.1	Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
500.11.9.2	Tarif Angkutan Barang
500.11.9.3	Izin Operasi Angkutan Barang Tertentu
500.11.9.4	Pembinaan Angkutan Barang
500.11.9.5	Izin Dispensasi Angkutan Jalan
500.11.10	Monitoring Operasional
500.11.10.1	Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
500.11.10.2	Pengawasan, Penertiban, dan Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Operasional Kendaraan Angkutan Umum yang Menjadi Kewenangan
500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
500.11.11.1	Pedoman Teknis
500.11.11.2	Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
500.11.11.3	Bimtek Penyidik Pegawai Negeri Sipil
500.11.11.4	Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil
500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, danau, dan Penyeberangan
500.11.12.1	Pendataan Jaringan Transportasi Sungai, danau, dan Penyeberangan
500.11.12.2	Analisis serta Informasi Jaringan Transportasi Sungai, danau, dan Penyeberangan
500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, danau dan Penyeberangan
500.11.13.1	Pengembangan dan Penetapan Jaringan Transportasi Sungai, danau dan Penyeberangan (Peta Jaringan, Blueprint Jaringan)
500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan
500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, danau, dan Penyeberangan
500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, danau, dan Penyeberangan
500.11.15.1	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Sungai, danau dan Penyeberangan
500.11.15.2	Pengawasan dan Registrasi Sarana Angkutan Sungai dan danau dan Penyeberangan
500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, danau dan Penyeberangan
500.11.16.1	Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Sungai, danau dan Penyeberangan
500.11.16.2	Pemberian Sertifikasi Pelabuhan Penyeberangan
500.11.16.3	Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan di Lintas Nasional dan Internasional
500.11.16.4	Penyelenggaraan, Pemeliharaan, Perawatan dan Perbaikan Pelabuhan Sungai, danau dan Penyeberangan
500.11.17	Kualifikasi Teknis Petugas Pelabuhan Sungai, danau, dan Penyeberangan
500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, danau dan Penyeberangan
500.11.18.1	Manajemen Lalu Lintas
500.11.18.2	Tata Cara Berjalan Lintas di Sungai, danau dan Penyeberangan
500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai dan danau
500.11.18.4	Sertifikasi Inspektur Sungai dan danau dan Pejabat Pemberangkatan Angkutan Sungai dan danau
500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, danau, dan Penyeberangan
500.11.19.1	Pengerukan Alur Pelayaran Sungai, danau, dan Kolam Pelabuhan Penyeberangan
500.11.19.2	Penetapan Kelas Alur dan Peta Alur Pelayaran Sungai dan danau

1	2
500.11.19.3	Perambuan Sungai, danau dan Penyeberangan
500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan
500.11.20.1	Penyelenggaraan Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan
500.11.20.2	Persetujuan Operasi Kapal Penyeberangan di Lintas Nasional dan Internasional
500.11.21	Tarif dan Keperintisan
500.11.21.1	Perhitungan Tarif, Pemantauan Tarif Angkutan dan Jasa Pelabuhan Sungai, danau dan Penyeberangan
500.11.21.2	Kriteria dan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan
500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan
500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan
500.11.22.2	Transportasi Perkotaan yang Berbasis Jalan, Jalan Rel, dan Perairan Daratan
500.11.22.3	Transportasi Perkotaan Untuk Kawasan Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi
500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan
500.11.23.1	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan
500.11.23.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan di Jalan Nasional Dalam Kawasan Perkotaan
500.11.23.3	Penanganan Lalu Lintas Perkotaan Berbasis Teknologi di Wilayah
500.11.24	Angkutan Perkotaan
500.11.24.1	Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Dalam Trayek
500.11.24.2	Jaringan Trayek Perkotaan
500.11.24.3	Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan Dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi
500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
500.11.25.1	Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Tidak Dalam Trayek Untuk Angkutan Penumpang dan/atau Barang
500.11.25.2	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan yang Menghubungkan Antarsimpul (Bandara, Pelabuhan, Stasiun, dan Terminal) di Kawasan Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi
500.11.25.3	Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan Tidak Dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi
500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan
500.11.26.1	Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Berwawasan Lingkungan
500.11.26.2	Penanganan Dampak Transportasi di Kawasan Perkotaan
500.11.26.3	<i>Masterplan</i> Pengembangan Teknologi Transportasi Ramah Lingkungan
500.11.26.4	Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional Dalam Kawasan Kota
500.11.26.5	Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional Dalam Kawasan Perkotaan
500.11.26.6	<i>Masterplan</i> Transportasi Perkotaan
500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan
500.11.27.1	Monitoring dan Evaluasi Data Kecelakaan
500.11.27.2	Kualifikasi Unit Pengkajian
500.11.27.3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, danau dan Penyeberangan
500.11.28	Pengembangan Keselamatan
500.11.28.1	Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, danau, dan Penyeberangan
500.11.28.2	Harmonisasi Kebijakan
500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan

1	2
500.11.29.1	Promosi Keselamatan: Penyuluhan, Publikasi dan Destinasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, danau, dan Penyeberangan
500.11.29.2	Kemitraan Keselamatan Antar Lembaga dan Masyarakat di Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, danau, dan Penyeberangan
500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum
500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan Awak Kapal Sungai dan danau
500.11.31	Audit Keselamatan
500.11.31.1	Pedoman Audit Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia
500.11.31.2	Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Jalan dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, danau dan Penyeberangan
500.11.31.3	Audit Faktor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, danau, dan Penyeberangan serta Laik Fungsi Jalan
500.11.32	Inspeksi Keselamatan
500.11.32.1	Pedoman Keselamatan
500.11.32.2	Inspeksi Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia, dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, danau, dan Penyeberangan
500.11.32.3	Investigasi Kecelakaan Sungai, danau dan Penyeberangan serta Laik Fungsi Jalan
500.11.33	Parkir
500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
500.11.33.2	Izin Tempat Khusus Parkir Swasta
500.11.33.3	Surat Tugas T Khusus Parkir Pemerintah
500.12	Komunikasi dan Informatika
500.12.1	Kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
500.12.2	Telekomunikasi
500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
500.12.3	Penyiaran
500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal
500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Kota Madiun
500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Nonpemerintah Daerah
500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
500.12.5	Pengendalian Informatika
500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
500.12.6	<i>E- Government</i>
500.12.6.1	Tata Kelola <i>E-Government</i>
500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur <i>E-Government</i>
500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkoneksi <i>E-Government</i>
500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
500.12.7	<i>E- Business</i>
500.12.7.1	Tata Kelola <i>E-Business</i>

1	2
500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur <i>E-Business</i>
500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkoneksi <i>E-Business</i>
500.12.7.4	Aplikasi Layanan <i>E-Business</i>
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat
500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika
500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10	Keamanan Informasi
500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11	Komunikasi Publik
500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi
500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
500.12.12.2	Informasi Perekonomian
500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13	Pengelolaan Media Publik
500.12.13.1	Media Cetak
500.12.13.2	Media <i>Online</i>
500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
500.12.14	Kemitraan Komunikasi
500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
500.12.15	Infrastruktur Informatika
500.12.15.1	Jaringan
500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika
500.12.15.3	Keamanan Informatika
500.12.16	Sistem dan Data
500.12.16.1	Portal dan Konten
500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data
500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi
500.12.17	Pusat Kerja Sama
500.12.17.1	Kerja Sama Daerah
500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral
500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
500.12.18.1	Pelayanan Informasi
500.12.18.2	Hubungan Masyarakat
500.12.18.3	Bimbingan Teknis
500.12.19	Evaluasi
500.13	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.13.1	Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata
500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata

1	2
500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata
500.13.2.3	Industri Pariwisata
500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan <i>Event</i>
500.13.3	Pemasaran Pariwisata
500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
500.13.4.1	Pengembangan Industri Perfilman
500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
500.13.5.3	Kerja Sama dan Fasilitasi
500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
500.13.6.3	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.14	Statistik
500.14.1	Kebijakan di Bidang Statistik yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
500.14.2.1	Perencanaan
500.14.2.2	Persiapan, antara lain Penyusunan Rancangan Organisasi Kegiatan Sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan Konsep dan Definisi, Penyusunan Metodologi (Cakupan, Organisasi, Lapangan, Ukuran Statistik, Prosedur), Penyusunan Buku Pedoman (Pencacahan, Pengawasan, Pengolahan), Penyusunan Peta Wilayah Kerja dan Muatan Peta Wilayah, Penyusunan Pedoman Sosialisasi, Sosialisasi Kegiatan Kepada Stakeholder dan Sumber Data (<i>Leaflet</i> , Poster, Pertemuan), Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi (Intern dan Ekstern), Pelaksanaan Pelatihan Instruktur (<i>Training of Trainers</i>), Pelaksanaan Pelatihan Petugas, Penyusunan Program Pengolahan (<i>Rule Validasi</i> , Pemeriksaan Data Entri, Tabulasi), Pelatihan Petugas Pengolahan, Perancangan Tabel, Pelaksanaan Uji Coba
500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
500.14.2.4	Pengolahan, antara lain Pengelolaan Dokumen (Penerimaan/Pengiriman, Pengelompokan/ <i>Batching</i>), Pemeriksaan Dokumen dan Pengkodean (<i>Editing/Coding</i>), Perekaman Data (Entri, <i>Scanner</i>), Tabulasi Data, Pemeriksaan Tabulasi, Laporan Konsistensi Tabulasi
500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
500.14.2.6	Diseminasi Hasil Sensus
500.14.3	Survei
500.14.3.1	Perencanaan
500.14.3.2	Persiapan
500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan, antara lain Pelaksanaan Listing, Pemilihan Sampel, Pengumpulan Data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring Kualitas

1	2
500.14.3.4	Pengolahan, antara lain Pengelolaan Dokumen (Penerimaan/Pengiriman, Pengelompokan/ <i>Batching</i>), Pemeriksaan Dokumen dan Pengkodean (<i>Editing/Coding</i>), Perekaman Data (<i>Entri, Scanner</i>), Tabulasi Data, Pemeriksaan Tabulasi, Laporan Konsistensi Tabulasi
500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, antara lain Pembahasan Angka Hasil Pengolahan, Penyusunan
500.14.3.6	Diseminasi Hasil Survei
500.14.4	Konsolidasi Data Statistik
500.14.4.1	Kompilasi Data
500.14.4.2	Analisis Data
500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik
500.15	Ketenagakerjaan
500.15.1	Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja
500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
500.15.3	Pengembangan Standardisasi Kompetensi
500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu Lembaga Pelatihan
500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antarlembaga
500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
500.15.5.1	Nstruktur dan Psm Lembaga Pelatihan Pemerintah
500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Pelatihan
500.15.6	Bina Pemagangan
500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan
500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja
500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
500.15.8.3	Bursa Kerja
500.15.8.4	Analisis Jabatan
500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
500.15.9.1	Antarkerja

1	2
500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerja Sama Antarlembaga
500.15.11	Standardisasi Profesi
500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
500.15.12.2	Perjanjian Kerja
500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13	Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial
500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
500.15.13.3	Pemasarakatan Hubungan Industrial
500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.14.1	Pengupahan
500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
500.15.17.3	Kerja Sama Lintas Sektoral
500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
500.15.20	Bina Penegakan Hukum
500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
500.15.20.4	Kerja Sama Penegakan Hukum
500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1	2
500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.21.2	Hasil Kajian, Perekrayasaan dan Penerapan Teknologi, dan Alih Teknologi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.22	Pengembangan Sumber Daya Manusiadan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusiadan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.22.2	Penyebearluasan Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusiadan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusiadan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusiadan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusiadan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusiadan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.16	Penanaman Modal
500.16.1	Kebijakan di Bidang Penanaman Modal yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal
500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur
500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan
500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur
500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal
500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah
500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha
500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
500.16.4	Promosi Penanaman Modal
500.16.4.1	Pegembangan Promosi
500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi
500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri
500.16.4.4	Promosi Sektoral
500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah
500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi
500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal
500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
500.16.5.2	Kerja Sama Regional
500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal
500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal
500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah

1	2
500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal
500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal
500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi
500.16.7.2	Pelayanan Perijinan
500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan
500.16.7.4	Pelayanan Nonperijinan
500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas
500.17	Pertanahan
500.17.1	Kebijakan di Bidang Pertanahan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan
500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian
500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
500.17.3.1	Penatagunaan Tanah
500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik
500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah
500.17.4	Sengketa Tanah
500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa
500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian
500.18	Transmigrasi
500.18.1	Kebijakan di Bidang Transmigrasi yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi
500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah
500.18.2.3	Dokumentasi Pertahanan
500.18.2.4	Advokasi
500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
500.18.3.1	Penyiapan Lahan
500.18.3.2	Penyiapan Sarana
500.18.3.3	Penyiapan Prasarana
500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman
500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi
500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan
500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan
500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi
500.18.5	Partisipasi Masyarakat
500.18.5.1	Promosi dan Motivasi
500.18.5.2	Kerja Sama Kelembagaan
500.18.5.3	Kerja Sama Antardaerah
500.18.5.4	Pelayanan Investasi
500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
500.18.6.2	Bina Sistem Informasi
500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan
500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat
500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan

1	2
500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya
500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan
500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
500.18.8	Pengembangan Usaha
500.18.8.1	Kewirausahaan
500.18.8.2	Produksi
500.18.8.3	Pengelolaan Hasil dan Pemasaran
500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan Permodalan
500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
500.18.9.2	Pengembangan Sarana
500.18.9.3	Pengembangan Prasarana
500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
500.18.10	Penyerasian Lingkungan
500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
600	Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
600.1	Pekerjaan Umum
600.1.1	Kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air
600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai
600.1.2.2	Kelembagaan
600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air
600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan
600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
600.1.3.2	Manajemen Mutu
600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air
600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman
600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air
600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai
600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa
600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, danau, Situ dan Embung
600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, danau, Situ, dan Embung
600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6	Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)
600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6.2	Pemograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Akibat Lumpur Sidoarjo
600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan
600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan

1	2
600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
600.1.8	Pembangunan Jalan
600.1.8.1	Standar dan Pedoman
600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
600.1.8.3	Pengelolaan Gedometri, Perkerasaan, dan <i>Drainage</i>
600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
600.1.9	Preservasi Jalan
600.1.9.1	Standar dan Pedoman
600.1.9.2	Perencanaan Teknis
600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
600.1.10	Pengelolaan Jembatan
600.1.10.1	Standar dan Pedoman
600.1.10.2	Perencanaan Teknis
600.1.10.3	Teknik Jembatan
600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
600.1.12	Pengaturan Jalan Tol
600.1.12.1	Persiapan Pengusahaan Jalan Tol
600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
600.1.12.4	Pengambilalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol
600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman
600.1.14.1	Perencanaan Teknis
600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
600.1.14.5	Kelembagaan
600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan
600.1.15.1	Perencanaan Teknis
600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
600.1.15.5	Kelembagaan
600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
600.1.16.1	Perencanaan Teknis
600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
600.1.16.5	Kelembagaan
600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
600.1.17.1	Perencanaan Teknis
600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
600.1.17.5	Kelembagaan
600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja

1	2
600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi
600.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
600.2.1	Kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Madiun
600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan
600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan
600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
600.2.2.3	Kemitraan
600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan
600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan
600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer
600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder
600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan
600.2.4.5	Pengelolaan dana Pembiayaan Perumahan
600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan
600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan
600.2.5.2	Analisa Teknik
600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
600.2.6	Penyediaan Rumah Susun
600.2.6.1	Perencanaan Teknik
600.2.6.2	Penyediaan
600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
600.2.6.4	Pengelolaan
600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus
600.2.7.1	Perencanaan Teknik
600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
600.2.7.3	Bimbingan Teknis dan Supervisi
600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
600.2.7.5	Perencanaan Teknik
600.2.7.6	Fasilitas <i>Backlog</i> Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
600.2.8.1	Perencanaan Teknik
600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9	Investasi Infrastruktur
600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
600.2.10.4	Manajemen Mutu
600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
600.2.11.1	Kelembagaan
600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi

1	2
600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
600.2.13	Peningkatan Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.13.1	Peningkatan Kerja Sama
600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi
600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerja Sama Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.2	Pengembangan Materi
600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat
600.2.16.1	Antarsektor
600.2.16.2	Antarwilayah
600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis
600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan
600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat
600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi
600.3	Tata Ruang (Tata Kota)
600.3.1	Kebijakan di Bidang Tata Ruang yang Dilakukan Pemerintahan Daerah
600.3.2	Perencanaan
600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rencana Tata Ruang Wilayah
600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang
600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan
600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana Prasarana Kabupaten
600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota Prasarana Kota
600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian
600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
600.3.3.2	Izin Pemanfaatan Ruang
600.3.3.3	Pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang
600.3.4	Pemetaan
600.3.4.1	Peta Dasar
600.3.4.2	Survei Pemetaan Ruang Darat
600.3.4.3	Survei Pemetaan Ruang Air
600.3.4.4	Survei Pemetaan Ruang Udara
600.4	Lingkungan Hidup

1	2
600.4.1	Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun
600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup
600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan Ekoregion, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
600.4.4	Ekonomi Lingkungan
600.4.5	Dampak Lingkungan
600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
600.4.5.2	Penerapan Sistem Kebijakan Dampak Lingkungan
600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan
600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan
600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa
600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan
600.4.8.1	Pengembangan
600.4.8.2	Pemanfaatan
600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
600.4.8.4	Keamanan Hayati
600.4.8.5	Pengendalian Kerusakan Lahan
600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
600.4.9.2	Rawa
600.4.10	Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer
600.4.10.1	Perangkat Mitigasi
600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim
600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
600.4.13.1	Pengumpulan dan Pemanfaatan
600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas
600.4.14	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pemulihan Kontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

1	2
600.4.14.1	Pemantauan
600.4.14.2	Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi
600.4.15	Pengelolaan Sampah
600.4.15.1	Pembatasan Sampah
600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
600.4.15.4	Penetapan Pemenang Adipura
600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan
600.4.16.1	Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan
600.4.16.2	Penataan Hukum Administrasi Lingkungan
600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan
600.4.17.1	Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
600.4.17.2	Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan
600.4.18	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
600.4.18.1	Penyidikan
600.4.18.2	Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
600.4.18.3	Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
600.4.19	Komunikasi Lingkungan
600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat
600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
600.4.20.2	Kearifan Lingkungan
600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat
600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan
600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan
600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat
600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan
600.4.23.1	Pengelolaan Data
600.4.23.2	Pengelolaan Informasi
600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
600.4.24	Kelembagaan Lingkungan
600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
600.4.25	Standarisasi dan Teknologi
600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan
600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan
600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian
700	Pengawasan
700.1	Pengawasan Internal
700.1.1	Rencana Pengawasan
700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan
700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan
700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan

1	2
700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan
700.1.2.1	Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Akuntan, Laporan Auditor Independen yang Memerlukan Tindak Lanjut
700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi dan Memerlukan Tindak Lanjut
700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi dan Tidak Memerlukan Tindak Lanjut
700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
700.1.2.9	<i>Good Corporate Governance</i>
800	Kepegawaian
800.1	Sumber Daya Manusia
800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara antara lain: Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan
800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi antara lain: Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi Asn, Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi Ikatan Dinas
800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.4	Standarisasi Jabatan antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai
800.1.2.1	Formasi Asn antara lain: Usulan Formasi, Usulan Permintaan Formasi Kepada Menpan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan Aparatur Sipil Negara antara lain: Proses Rekrutmen Asn, Penetapan Pengumuman Kelulusan Aparatur Sipil Negara
800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan Aparatur Sipil Negara
800.1.2.4	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
800.1.2.5	Pengangkatan Aparatur Sipil Negara
800.1.2.6	Open Bidang (Seleksi Terbuka Jabatan)
800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara
800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Aparatur Sipil Negara
800.1.3	Mutasi Pegawai
800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antar Perwakilan, Mutasi Ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara
800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan

1	2
800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat
800.1.4	Pengembangan Karir
800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi Lain/ Pertukaran Antar Asn dengan Pegawai Swasta
800.1.4.2	Penyesuaian Ijazah
800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja
800.1.4.5	Angka Kredit antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara
800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
800.1.5.2	Pengelolaan <i>Database</i> dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun Aparatur Sipil Negara
800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
800.1.6.2	Disiplin
800.1.6.3	Pemberhentian dengan Hormat
800.1.6.4	Pemberhentian dengan Tidak Hormat
800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
800.1.6.6	Pensiun Aparatur Sipil Negara antara lain: Administrasi Pensiun, Penetapan Pensiun, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya
800.1.7	Bantuan Hukum
800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai
800.1.8.1	Status Kepegawaian
800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
800.1.8.3	Keberatan Pegawai
800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian
800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10	Pengawasan dan Pengendalian
800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Aparatur Sipil Negara
800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
800.1.10.6	Sanggahan Terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11	Administrasi Pegawai
800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
800.1.11.2	Cuti Sakit

1	2
800.1.11.3	Cuti Bersalin
800.1.11.4	Cuti Tahunan
800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
800.1.11.6	Cuti Besar
800.1.11.7	Cuti di Luar Tanggungan Negara
800.1.11.8	Kartu Pegawai/ Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik/Kartu Istri/Kartu Suami
800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan
800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi
800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai
800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan
800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/Tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai
800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
800.1.12.2	Asuransi Pegawai/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
800.1.12.3	Tabungan Perumahan
800.1.12.4	Bantuan Sosial
800.1.12.5	Pakaian Dinas
800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
800.1.12.9	Olah Raga dan Rekreasi
800.1.12.10	Rekam Medis
800.1.13	Administrasi Perseorangan
800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil
800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
800.1.13.3	Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang Disetarakan
800.1.13.4	Sekretaris Daerah
800.1.13.5	Asn Berjasa/Terlibat Dalam Peristiwa Berskala Nasional
800.1.14	Penilaian Kompetensi
800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2	Pendidikan dan Pelatihan
800.2.1	Kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Madiun
800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan
800.2.2.1	Sistem Informasi Program dan Pembinaan Diklat
800.2.2.2	Pedoman-Pedoman Kediklatan
800.2.2.3	Kurikulum-Kurikulum Diklat
800.2.2.4	Modul Diklat
800.2.2.5	Panduan Fasilitator
800.2.2.6	Saran/Rekomendasi Penyelenggaraan Diklat
800.2.2.7	Notulen Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
800.2.2.8	Monitoring dan Evaluasi Program dan Pembinaan Diklat
800.2.2.9	Konsultasi, Advokasi, Asistensi Diklat
800.2.3	Widyaiswara
800.2.3.1	Seleksi dan Pengembangan Widyaiswara
800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
800.2.3.3	Monitoring dan Evaluasi Widyaiswara
800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
800.2.3.5	Konsultasi, Advokasi, dan Asistensi Widyaiswara
800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara

1	2
800.2.4	Penyelenggaraan Diklat
800.2.4.1	Perencanaan, Peserta, Pengajar, Penjadwalan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
800.2.4.3	Konsultasi, Advokasi, Asistensi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
800.2.4.4	Pengembangan Bahan Ajar dan Metodologi Pembelajaran
800.2.4.5	Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan
800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
800.2.4.7	Monitoring dan Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan
800.2.5	Alumni
900	Keuangan
900.1	Keuangan Daerah
900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran
900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan
900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
900.1.2	Penyusunan Anggaran
900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan
900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan Kota
900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Telah Disetujui Sekretaris Daerah
900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Telah Disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran
900.1.3.1	Surat Penyedia dana (Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana) Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, Langsung
900.1.3.2	Pendapatan
900.1.3.3	Belanja
900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan dana
900.1.3.7	Daftar Gaji
900.1.3.8	Kartu Gaji
900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah
900.1.3.10	Laporan Keuangan
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)
900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor Untuk Membiayai (<i>Green Book</i>)
900.1.4.3	Dokumen <i>Memorandum Of Understanding</i> dan Dokumen Sejenisnya
900.1.4.4	Dokumen <i>Loan Agreemeent</i> antara lain: <i>Draft Agreement, Legal Opinion</i> , Surat Menyurat dengan Lender
900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan dana Luar Negeri, antara lain Usulan Luncuran dana
900.1.4.6	Aplikasi Penarikan dana Bln Berikut Lampirannya
900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan dana (<i>Payment Advice</i>)

1	2
900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan dana Bantuan Luar Negeri, Yaitu Surat Perintah Pencairan dana, Surat Perintah Membayar Beserta Lampirannya, antara lain Surat Perintah Pembayaran, Kontrak, Berita Acara, dan Data Pendukung Lainnya.
900.1.4.9	<i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan dana dari Negara Donor) Meliputi antara lain <i>No Objection Letter, Project Implementation, Notification Of Contract, Withdrawal Authorization</i>
900.1.4.10	<i>Staff Appraisal Report</i>
900.1.4.11	<i>Report/Laporan</i>
900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
900.1.4.13	<i>Completion Report/Annual Report</i>
900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.5	Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulan/Semesteran
900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, Atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, Termasuk Specimen Tanda Tangan
900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran dan Lampirannya: Surat Perintah Pembayaran-Surat Perintah Pembayaran-Daftar Perincian Penggunaan Surat Perintah Pendebitan Rekening-Surat Perintah Dimulainya Renovasi-Langsung, Surat Perintah Membayar-Langsung, Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan, Bilyet Giro, Spm Nihil, Penagihan/ <i>Invoice</i> , Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank Beserta Bukti Pendukungnya antara lain <i>Copy</i> Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/ <i>Service Report</i> dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
900.1.7.3	Buku Rekening Bank
900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
900.1.7.5	Pembukuan Anggaran Terdiri antara lain Buku Kas Umum, Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran, Daftar Himpunan Pencairan, dan Rekening Koran
900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan
900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan Termasuk dana Sisa atau Pengeluaran Lainnya
900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak Termasuk Pajak Penghasilan 21, Pajak Penghasilan 22, Pajak Penghasilan 23, dan Pajak Pertambahan Nilai dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
900.1.9	Penyusunan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Biaya Bantuan Pemilihan Umum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Meliputi

1	2
	Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi Untuk Biaya Pemilihan Kepala Daerah dan Bantuan Pemilihan Umum, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panitia Pengawas Daerah Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Permohonan Pengajuan Rencana Kerja Anggaran Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panitia Pengawas, Berkas Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Bantuan Pemilihan Umum, Rencana Anggaran Satuan Kerja Pilkada dan Bantuan Pemilihan Umum Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panitia Pengawas Kota dan Bantuan Biaya Pemilihan Umum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Berkas Pembentukan dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Bantuan Biaya Pemilihan Umum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Nota Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemilihan Kepala Daerah dan Bantuan Biaya Pemilihan Umum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
900.1.10	Pelaksanaan Anggaran Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Komisi Pemilihan Umum Daerah, Bendahara Panitia Pengawas Daerah dan Bendahara Pada Panitia Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum
900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/ Pemilihan Umum
900.1.10.3	Berkas Setor Sisa dana Pemilihan Kepala Daerah/ Pemilihan Umum Termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/ Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilihan Umum Termasuk Diantaranya Bukti Transfer Bank
900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional Pemilihan Umum Termasuk Perubahan/ Pergeseran/ Revisinya
900.1.11	Pemeriksaan/ Pengawasan Keuangan Daerah
900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan
900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
900.1.12	Anggaran Daerah
900.1.12.1	Anggaran Daerah
900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah
900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain: Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Standardisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Bimbingan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Analisis dan Evaluasi, Pemantauan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Fasilitasi Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1	2
900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah antara lain Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan, Fasilitas serta Bimbingan Teknis di Bidang Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Nonkeuangan, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah antara lain Analisis, Standarisasi Teknis, Fasilitasi serta Bimbingan Teknis, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan, Standardisasi Teknis, Prosedur dan Kriteria, Fasilitasi serta Bimbingan Teknis Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah antara lain Fasilitasi serta Bimbingan Teknis Pengelolaan Kekayaan, Fasilitasi serta Bimbingan Teknis Investasi Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kekayaan, dan Investasi Daerah
900.1.13.5	Pinjam dan Obligasi Daerah antara lain Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah Kota Madiun dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Obligasi Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dana Bergulir yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bimbingan Teknis Obligasi Daerah, Dana Bergulir serta Penyertaan Modal Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah, Obligasi Daerah, dan dana Bergulir dan Penyertaan Modal Daerah
900.1.14	Fasilitasi dana Perimbangan
900.1.14.1	Fasilitasi dana Alokasi Umum antara lain Koordinasi Penyiapan Data Dasar Penghitungan, dan Rekonsiliasi dana Alokasi Umum, Sosialisasi dan Supervisi dana Alokasi Umum, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dana Alokasi Umum
900.1.14.2	Fasilitasi dana Alokasi Khusus antara lain Koordinasi Penyiapan Data Dasar, Sosialisasi dan Supervisi dana Alokasi Khusus, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dana Alokasi Khusus, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dana Alokasi Khusus
900.1.14.3	dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam antara lain Koordinasi Penyiapan Data Dasar Perhitungan, dan Rekonsiliasi dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Sosialisasi dan Supervisi dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam

1	2
900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya antara lain Sosialisasi dan Supervisi Dana Otonomi Khusus, Sosialisasi dan Supervisi dan Transfer Lainnya, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta Otonomi Khusus dan dana Transfer Lainnya
900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan antara lain: Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan dan Perimbangan, Penyiapan Dukungan Teknis dana Perimbangan, dan Penyiapan Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan dana Perimbangan
900.1.15	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
900.1.15.1	Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli antara lain: Penyiapan Bahan Bantuan Keterangan Ahli di Bidang Keuangan Daerah dan Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Penyiapan Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

WALI KOTA MADIUN,

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MAIDI



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009